

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK**

**TATA KELOLA SAMPAH OLEH PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
(Studi Di Pasar Tradisional Kelurahan Enok)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Strata satu (S1)
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau

Oleh :

Imam Has
NPM : 177310754

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
PEKANBARU
2021**

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Imam Has
NPM : 177310754
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Tata Kelola Sampah Oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten
Indragiri Hilir (Studi di Pasar Tradisional Kelurahan Enok).

Format sitematika dan pembahasan masing-masing materi dalam naskah skripsi ini telah disusun sesuai dengan saran tim penguji dan oleh karena itu semoga dapat disetujui untuk dilanjutkan sesuai dengan tahap pelaksanaan penelitian ilmiah

Pekanbaru, 12 Oktober 2021

Turut Menyetujui :
Program Studi Ilmu Pemerintahan Pembimbing
Ketua,

Dr.Ranggi Ade Febrian, S.IP.,M.Si

Dr.Ranggi Ade Febrian, S.IP.,M.Si

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Imam Has
NPM : 177310754
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Tata Kelola Sampah Oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Studi di Pasar Tradisional Kelurahan Enok).

Naskah skripsi secara keseluruhan dinilai Relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan Metode Penelitian Ilmiah, Oleh karena itu Tim Penguji Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk salah satu syarat guna memperoleh Gelar Sarjana.

Ketua, Pekanbaru, 12 Oktober 2021
Sekretaris,

Dr.Ranggi Ade Febrian, S.IP.,M.Si

Rijalul Fikri, S.Sos, MA

Turut Menyetujui ,
Wakil Dekan I

Anggota,

Indra Syafri, S.Sos, M.Si

Dr. Zainal, S.Sos, M.Si

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Imam Has
NPM : 177310754
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Tata Kelola Sampah Oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Studi di Pasar Tradisional Kelurahan Enok).

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh Mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu dapat disahkan sebagai sebuah Karya Ilmiah.

Pekanbaru, 12 Oktober 2021

An. Tim Penguji
Sekretaris,

Ketua,

Dr.Ranggi Ade Febrian, S.IP.,M.Si

Rijalul Fikri, S.Sos, MA

Turut Menyetujui ,
Wakil Dekan I

Program Studi Ilmu Pemerintahan
Ketua,

Indra Syafri, S.Sos, M.Si

Dr.Ranggi Ade Febrian, S.IP.,M.Si

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Alhamdulillah tiada kata dan ucapan yang pantas penulis ungkapkan melainkan pujian dan syukur kehadirat Allah AWT yang telah memberikan Rahmat dan hidayahnya berupa kesehatan serta kesempatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan usulan penelitian ini. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Baginda Rasulullah yakni Nabi Besar Muhammad SAW, dengan ucapan “Allahumma Sholli’alaa Syayidina Muhammad Wa’alaa Alihii Syayidina Muhammad”.

Adapun judul dari Skripsi ini yaitu **“Tata Kelola Sampah Oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Studi di Pasar Tradisional Kelurahan Enok)”**. Skripsi ini penulis tulis dan di ajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Strata satu (S1) Bidang Ilmu Sosial Program Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

Melalui kata pengantar ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih sebesar - besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan, ucapan terima kasih ini penulis sampaikan:

1. **Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., M.C.L** selaku Rektor Universitas Islam Riau yang menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada lembaga pendidikan yang Beliau pimpin.

2. **Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, S.Ag, M.Si.** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah menyediakan fasilitas dan memberikan dukungan serta kesempatan kepada penulis menimba ilmu di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang beliau pimpin.
3. **Bapak Dr. Rangi Ade Febrian, S.IP., M.Si** selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan dan Selaku Pembimbing yang telah memfasilitasi dan menyumbangkan pemikiran kepada penulis terutama selama proses bimbingan berlangsung sehingga proposal ini dapat diselesaikan dengan baik.
4. **Bapak Andryius S.Sos., M.Si** selaku Sekretaris Prodi Studi Ilmu Pemerintahan yang telah memberikan kesempatan pada penulis dan menimba ilmu pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
5. Para Bapak dan Ibu Dosen khususnya Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau yang telah mendidik serta mengajarkan kepada penulis baik dilingkungan maupun di luar lingkungan kampus.
6. Ibu kepala Tata Usaha beserta seluruh Staf pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang senantiasa memberikan bantuan administrasi kepada penulis sehingga penulis dapat melaksanakan perkuliahan dengan sebagaimana mestinya.

7. Terkhusus dan teristimewa ucapan terima kasih yang tiada terhingga penulis persembahkan kepada Ibunda tercinta Ibu Syamsinah dan Ayah saya Bapak Slamet, B Ama.Pd, yang selalu memberikan dukungan penulis baik dari segi moral, materil maupun doa - doanya sehingga penulis dapat mudah dalam menyelesaikan proposal ini.
8. Kakak-Kakak ku Mbak Ayu dan Mbak Dedek, beserta keluarga besarku yang telah memberikan dukungan dalam menyelesaikan proposal ini.
9. Rekan-rekan seperjuangan dan teman-teman seperjuangan Muhammad Taufik, Tri Agung Susilo, Abdul Rahman Hadi, Muhammaf Fajar Rizki Ginting, Teguh, Aprizal, Sobri, Wahyu, Amek, Miftah, Zulva, dan seluruh kelas IP B angkatan 2017 dan orang-orang terdekat saya yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang selalu memberikan masukan, semangat dan motivasi.
10. Dan kepada seluruh yang terlibat baik dalam mendukung maupun memberi sarannya kepada penulis yang tidak dapat penulis cantumkan satu persatu.

Penulis dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman sudah berupaya memaksimal mungkin untuk menyusun setiap lembar bab per bab Skripsi ini sesuai dengan kaidah penelitian ilmiah dan ketentuan yang ditetapkan oleh fakultas. Walaupun demikian penulis menyadari bahwa pada lembar tertentu dan naskah usulan penelitian ini mungkin ditemukan berbagai kesalahan dan kekurangan. Untuk

membenahi hal tersebut penulis berharap kemakluman serta masukan dari para pembaca.

Penulis mendoakan semoga jasa baik yang telah diberikan kepada yang disebut di atas dibalas dengan rahmat dan karunia yang setimpal oleh Allah SWT. Aamiin... Akhirnya penulis sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini dan dapat memeberikan manfaat kepada setiap pembaca.

Pekanbaru, 12 Oktober 2021

Penulis,

Imam Has

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	13
BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	15
A. Studi Kepustakaan	15
1.1. Konsep Pemerintahan	15
1.2. Konsep Ilmu Pemerintahan.....	19
1.3. Konsep Pemerintahan Daerah.....	21
1.4. Konsep Tata Kelola	27
1.5. Konsep Sampah	32
1.6. Konsep Pasar	35
B. Penelitian Terdahulu	38
C. Kerangka Pikir	43
D. Konsep Operasional	44
E. Operasional Variabel	46
BAB III : METODE PENELITIAN.....	47
A. Tipe Penelitian	47
B. Lokasi Penelitian.....	48
C. Informan Penelitian.....	48
D. Jenis dan Sumber Data.....	48
E. Teknik Pengumpulan Data.....	49
F. Teknik Analisis Data	50

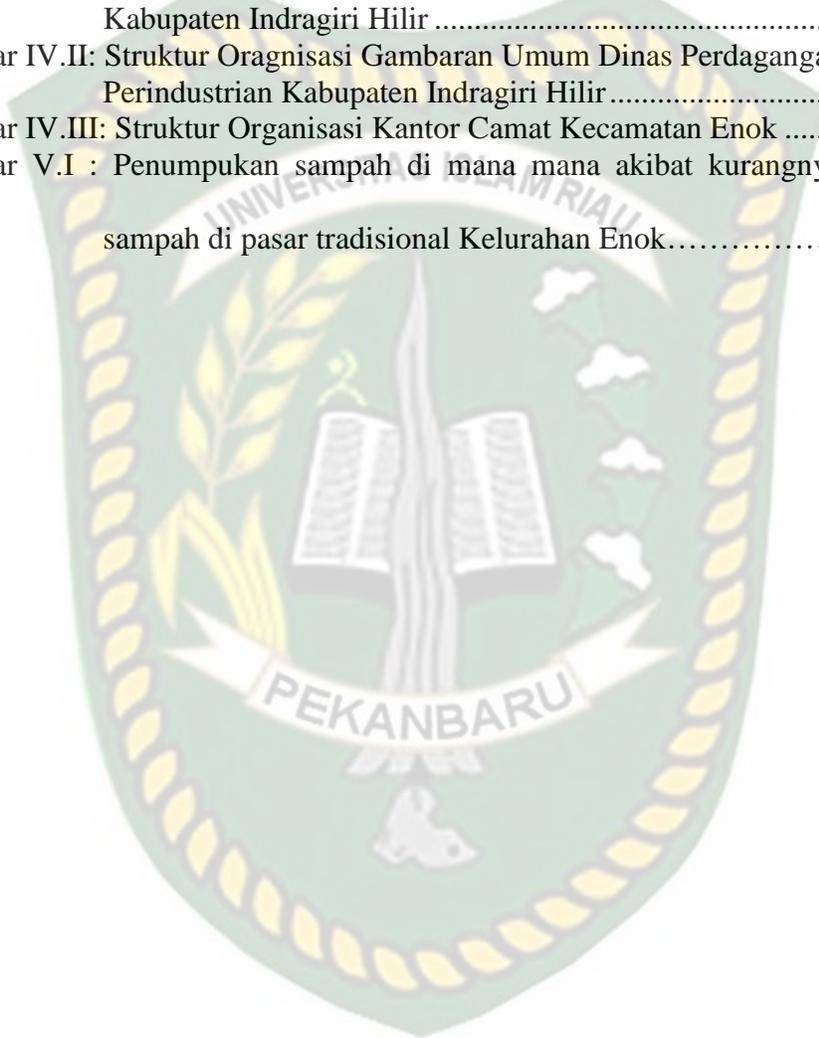
G. Jadwal Waktu Pelaksanaan Penelitian	52
BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	54
A. Gambaran Umum Kabupaten Indragiri Hilir.....	54
B. Pemerintahan	55
C. Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Indragiri Hilir.....	58
D. Gambaran Umum Dinas Perdagangan dan Perindustrian (DISPERINDAGRI) Kabupaten Indragiri Hilir	61
E. Gambaran Umum Camat Enok Kabupaten Indragiri Hilir.....	63
BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	65
A. Identitas Informan.....	65
B. Hasil Penelitian Tentang Tata Kelola Sampah Oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Studi Pasar Tradisional Kelurahan Enok).....	67
1. Aktor	68
2. Struktural	71
3. Empiric	76
C. Hambatan-hambatan dalam melakukan Tata Kelola Sampah di pasar Tradisional Kelurahan Enok Kabupaten Indragiri Hilir....	78
D. <i>Best Practice</i> Tata Kelola Sampah di salah satu Daerah di Indonesia.....	80
BAB VI : PENUTUP.....	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN PEDOMAN WAWANCARA	89
LAMPIRAN FOTO DOKUMENTASI WAWANCARA	109

DAFTAR TABEL

Tabel I.I: Data Jumlah Timbulan Sampah Di Kabupaten Indragiri Hilir	11
Tabel I.II: Data Pasar Kelurahan Enok	12
Tabel II.I: : Tata Kelola Sampah Oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Studi di Pasar Tradisional Kelurahan Enok)	46
Tabel III.I: Informan dan Key Informan dalam Penelitian Tentang Tata Kelola Sampah Oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Studi di Pasar Tradisional Kelurahan Enok).....	48
Tabel III.II: Jadwal waktu dan kegiatan penelitian Tata Kelola Sampah Oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Studi di Pasar Tradisional Kelurahan.....	52
Tabel IV.I: Data Nama Kecamatan dan Jumlah Desa/Kelurahan Di Kabupaten Indragiri Hilir	56
Tabel V.I: Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan	65
Tabel V.II: Identitas Infoman Berdasarkan Umur	66

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.I: Kerangka Pikir Penelitian Tentang Tata Kelola Sampah Oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Studi di Pasar Tradisional Kelurahan Enok).....	43
Gambar IV.I: Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir	60
Gambar IV.II: Struktur Organisasi Gambaran Umum Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Indragiri Hilir.....	62
Gambar IV.III: Struktur Organisasi Kantor Camat Kecamatan Enok	64
Gambar V.I : Penumpukan sampah di mana mana akibat kurangnya pengelolaan sampah di pasar tradisional Kelurahan Enok.....	73



SURAT PERNYATAAN

Saya Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau
Peserta Skripsi yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Imam Has
NPM : 177310754
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Judul Skripsi : Tata Kelola Sampah Oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten
Indragiri Hilir (Studi di Pasar Tradisional Kelurahan Enok).

Atas naskah yang didaftarkan pada Ujian Skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administrasi, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 12 Oktober 2021
Yang Menyatakan,

Imam Has

**TATA KELOLA SAMPAH OLEH PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
(Studi Di Pasar Tradisional Kelurahan Enok)**

ABSTRAK

Imam Has

Salah satu masalah yang dihadapi pengelolaan perkotaan/daerah dari seluruh dunia termasuk Indonesia adalah pengelolaan sampah. Seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi, taraf kehidupan penduduk juga meningkat. Permasalahan dalam Skripsi ini yaitu tidak terkelolanya sampah di pasar tradisional Kelurahan Enok Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir banyak sampah yang bertebaran dan menyebabkan kerusakan pada lingkungan sekitar pasar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Tata Kelola Sampah Oleh Pemerintahan Daerah kabupaten Indragiri Hilir. Adapun jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah Metode Penelitian Kualitatif yaitu penelitian yang menjadikan seorang manusia sebagai responden yang disesuaikan dengan situasi lapangan prosedur penelitian ini yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang yang diminati penulisan ini terdiri dari data primer yaitu penelitian berupa wawancara, dokumentasi serta observasi dan data sekunder Hasil dari penelitian ini adalah bahwa tidak semua pihak memiliki kewenangan atas pasar dan pengelolaan sampah di pasar tradisional Kelurahan Enok tersebut. Bisa dilihat dari hasil wawancara dengan pihak kecamatan bahwa kecamatan tidak memiliki kewenangan atas pasar tersebut, kewenangan pasar mutlak dimiliki oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Indragiri Hilir. Pihak Dinas Perdagangan dan Perindustrian mengiyakan atas kewenangan pasar tersebut namun hal itu tidak terlepas dari koordinasi dengan pihak Kecamatan karena letak pasar tersebut terletak pada kawasan Kecamatan. Kesimpulan di Kecamatan Enok belum mempunyai TPS dan TPA untuk sampah hal ini yang mengakibatkan penumpukan sampah di beberapa tempat seperti di selokan sekitar pasar yang membuat selokan tersebut menjadi tersumbat. Saran kepada pihak Kecamatan Enok dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir agar bisa menyelesaikan permasalahan sampah yang terjadi di pasar dan secepatnya membuat tempat pembuangan sampah agar tidak ada lagi sampah yang berserakan.

Kata Kunci: Tata Kelola, Sampah, dan Pasar

**WASTE MANAGEMENT BY LOCAL GOVERNMENT
INDRAGIRI HILIR DISTRICT
(Study at the Traditional Market, Enok Village)**

ABSTRACT

One of the problems facing urban/regional management from all over the world including Indonesia is waste management. Along with increasing economic growth, the standard of living of the population also increases. The problem in this thesis is that the waste is not managed in the traditional market, Enok Village, Enok District, Indragiri Hilir Regency, a lot of garbage is scattered and causes damage to the environment around the market. The purpose of this study was to find out how the Waste Management by the Regional Government of Indragiri Hilir Regency. The type of research in writing this thesis is a qualitative research method, namely research that makes a human as a respondent adapted to the field situation. research in the form of interviews, documentation and observation and secondary data. The results of this study are that not all parties have authority over the market and waste management in the traditional market of Enok Village. It can be seen from the results of interviews with the sub-district that the sub-district does not have authority over the market, the absolute authority of the market belongs to the Department of Trade and Industry of Indragiri Hilir Regency. The Department of Trade and Industry agreed with the authority of the market, but it could not be separated from coordination with the sub-district because the market was located in the sub-district area. In conclusion, Enok Subdistrict does not yet have TPS and TPA for waste, this has resulted in the accumulation of garbage in several places such as in the ditch around the market which makes the sewer clogged. Suggestions to the Enok Sub-district and the Environmental and Hygiene Service of Indragiri Hilir Regency to be able to solve the waste problems that occur in the market and immediately build a garbage disposal so that there is no more trash scattered around.

Keywords: Governance, Waste and Markets

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu masalah yang dihadapi pengelolaan perkotaan/daerah dari seluruh dunia termasuk Indonesia adalah pengelolaan sampah. Seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi, taraf kehidupan penduduk juga meningkat. Pertumbuhan perekonomian diindikasikan dengan peningkatan aktivitas produksi dan konsumsi. Peningkatan aktivitas produksi dan konsumsi akan berdampak pada peningkatan jumlah, jenis, dan keberagaman karakteristik timbunan sampah. Dalam hal ini tentu peran Pemerintah harus sangat berperan dalam pengelolaan sampah tersebut agar sampah tersebut tidak menjadi permasalahan di setiap negara, khususnya di Indonesia yang selalu di permasalahakan dengan dengan sampah.

Di banyak negara, sampah seringkali menimbulkan permasalahan. Penanganan sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan pencemaran lingkungan dan mengganggu estetika. Penumpukan sampah atau pembuangan sampah sembarangan ke kawasan terbuka akan mengakibatkan pencemaran tanah yang juga berdampak ke saluran air tanah. Sedangkan pembakaran sampah akan mengakibatkan pencemaran udara. Pembuangan sampah ke sungai juga mengakibatkan pencemaran air, dan tersumbatnya saluran air yang dapat menyebabkan banjir di musim hujan, pencemaran bau dan gangguan estetika. Lebih jauh lagi, penanganan sampah yang tidak komprehensif akan memicu masalah-masalah sosial, seperti amuk masa, bentrok antarwarga, pemblokiran Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), dan lain-lain.

Kehidupan manusia tidak terlepas dari berbagai masalah dan salah satunya adalah masalah sampah. Setiap orang pasti menghasilkan sampah. Menurunnya kualitas lingkungan akibat permasalahan sampah terkait dengan hubungan dan timbal balik antara penduduk, nilai-nilai dan model masyarakat terhadap pengelolaan sampah, organisasi atau lembaga pengelolaan sampah dan sistem pengelolaan sampah yang diterapkan.

Berdasarkan *IDN TIMES* mengatakan “ *Pekerjaan rumah permasalahan sampah di Indonesia masih sangat banyak. Jumlah timbulan sampah nasional pada 2020 mencapai 67,8 juta ton*”.

Penanganan sampah di masing-masing negara berbeda-beda tergantung dari kondisi sosial budaya masyarakat setempat, kebijakan pemerintah, regulasi, infrastruktur yang dimiliki, pendekatan teknologi, dan lain-lain.

Singapura adalah negara kota pulau kecil dengan populasi besar, iklim panas, dan kelembapan tinggi. Selama dua hingga tiga dekade terakhir, industrialisasi dan perkembangan ekonomi yang pesat telah menyebabkan peningkatan jumlah sampah yang sangat besar. Sampah yang dibuang setiap tahun meningkat dari 0,74 juta ton pada tahun 1972 menjadi 2,80 juta ton pada tahun 2000. Pengelolaan limbah padat manusia di Singapura secara tradisional dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup (ENV), dengan partisipasi berbagai entitas sektor swasta belakangan tahun ini. Hirarki pengelolaan sampah di Singapura adalah minimisasi sampah (*reduce, reuse dan recycle* atau biasa dikenal dengan 3R), diikuti dengan insinerasi dan penimbunan. Karena lahan sangat langka dan hanya tersedia TPA lepas pantai yang baru dibangun, limbah

padat yang terbakar telah diidentifikasi sebagai metode pembuangan yang disukai. (Bai & Sutanto, 2002)

Indonesia perlu belajar dari negara-negara lain yang telah berhasil dalam melakukan pengelolaan sampahnya secara efektif dan ramah lingkungan. Singapura adalah salah satu negara di kawasan Asia yang bisa dijadikan percontohan dalam melakukan strategi dan perencanaan pengelolaan sampah di Indonesia.

Menurut Hadi (2001) pembagian dan pengelolaan sampah adalah:

- a. Sampah Domestik, sampah ini berasal dari pemukiman atau perumahan.
- b. Sampah Komersil, sampah yang dihasilkan dari lingkungan kegiatan perdagangan
- c. seperti toko, restoran, rumah makan, pasar, dan swalayan.
- d. Sampah Industri, sampah ini merupakan hasil samping kegiatan industri yang
- e. jenisnya sangat tergantung pada kegiatan industri itu sendiri.
- f. Sampah Alami dan lainnya, dapat berupa dedaun, sisa bencana alam dan sebagainya.

Timbulnya limbah memerlukan pengelolaan yang memadai tergantung pada kuantitasnya pelaku, jenis dan kegiatan. Penanganan di tempat atau pengelolaan limbah di tempat sumbernya adalah pengolahan sampah yang masih memiliki nilai ekonomis, dilakukan sebelum sampah mencapai TPA. Pengelolaan sampah Situs memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengelolaan sampah pada fase selanjutnya. Kegiatan penanganan meliputi pemilahan, penggunaan kembali

(*reuse*) dan daur ulang bertujuan untuk mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan (*reduce*). Pengumpulan sampah merupakan kegiatan yang dilakukan dari rumah atau dari sumbernya. Produksi sampah tersebut masuk ke tempat penampungan sementara (TPS) sebelum terjadi. pengangkutan atau pemindahan sampah dari TPS ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).

Pengolahan sampah meliputi proses transformasi fisik berupa pemisahan komponen. Limbah dan pemadatan untuk memudahkan penyimpanan dan pengangkutan. Pembakaran untuk mengubah sampah menjadi bentuk gas sehingga volumenya dapat berkurang hingga 95%. Pupuk kompos alami dari sampah hijau dan bahan organik lainnya untuk mempercepat proses dekomposisi dan transformasi. pemborosan panas dan listrik. Sedangkan pengolahan sampah akhir adalah penempatan sampah pada tempat tertentu (*open landfill, sanitary landfill*) sampai kapasitas ruang tidak lagi mencukupi.

Sampah merupakan salah satu masalah lingkungan hidup yang saat ini belum dapat ditangani dengan baik. Kemampuan pengelolaan sampah dalam menangani sampah tidak seimbang dengan produksinya, sehingga sampah menumpuk di mana-mana. Sampah yang tidak tidak terurus dengan baik akan menyebabkan menurunnya kesehatan dan nilai estetika lingkungan karena pencemaran air, udara dan berkembangnya hama penyakit, sehingga pemukiman di sekitar tumpukan sampah tidak layak bagi penduduk.

Beberapa dampak apabila sampah tidak dikelola dengan baik adalah sebagai berikut (Suwerda, 2012):

1. Sampah dapat menjadi sumber penyakit, lingkungan menjadi kotor. Hal ini akan menjadi tempat yang subur bagi mikroorganisme patogen yang berbahaya bagi kesehatan manusia, dan juga menjadi tempat sarang lalat, tikus dan hewan liar lainnya.
2. Pembakaran sampah dapat berakibat terjadinya pencemaran udara yang dapat mengganggu kesehatan masyarakat, dan memicu terjadinya pemanasan global.
3. Pembusukan sampah dapat menimbulkan bau yang tidak sedap dan berbahaya bagi kesehatan. Cairan yang dikeluarkan dapat meresap ke tanah, dan dapat menimbulkan pencemaran sumur, air, tanah dan yang dibuang ke badan air akan mencemari sungai.
4. Pembuangan sampah ke sungai atau badan air dapat menimbulkan pendangkalan sungai, sehingga dapat memicu terjadinya banjir.

Jika pengelolaan sampah tidak dilaksanakan dengan baik, maka akan menimbulkan sumber masalah, baik sosial maupun lingkungan, yang muncul di masyarakat. Timbulnya berbagai penyakit akibat pencemaran air, tanah dan udara hanyalah sebagian kecil dari akibat buruknya pengelolaan sampah.

Dalam meningkatkan kebersihan pasar untuk menjaga lingkungan karena lingkungan merupakan kesatuan ruang dengan benda daya keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya. Sedangkan secara umum lingkungan adalah faktor dan keadaan yang berada di luar tubuh yang mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan organisme atau komunitas

organisme itu sendiri. Maka dari itu sangat penting kesadaran masyarakat untuk menghargai alam dan juga menyadari arti penting lingkungan bagi kelangsungan kehidupan sehingga lingkungan tidak akan rusak justru lingkungan akan dijaga sebaik mungkin demi berlangsungnya kehidupan dalam masyarakat dan juga sangat penting Peran dari Pemerintah untuk menjaga lingkungan yang bersih sehingga terwujud nya kebersihan pasar.

Banyak masyarakat atau orang yang sangat membutuhkan tempat berbelanja untuk mencari makanan, pakaian, dan tempat berteduh untuk kebutuhan kelangsungan hidup manusia. Indonesia adalah negara berkembang. Oleh karena itu, tidak terlepas dari permasalahan yang dihadapi, salah satunya adalah masalah kebersihan lingkungan pasar. Masalah kebersihan lingkungan di pasar cenderung meningkat jika tidak mendapat perhatian khusus dan perhatian yang besar dari masyarakat terhadap kebersihan lingkungan yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam kehidupan bernegara, masyarakat berkewajiban menjaga kebersihan lingkungan. 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup yang mendefinisikan lingkungan hidup sebagai kesatuan ruang dengan segala benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan pembangunan dan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya. (Efrida, 2012).

Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Promosi Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern Oleh karena itu diikuti dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 / MDAG / PER / 12/2013

tentang Pedoman Penataan dan Promosi. pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern, namun jika dibaca dengan seksama, peraturan tersebut hanya mengatur lokasi pusat perbelanjaan modern. Adapun pengaturan yang lebih rinci menjadi kewenangan Dewan Daerah yang di setiap daerah belum ada pengaturan yang tegas mengenai penataan penempatan pusat perbelanjaan modern dan pasar tradisional. Pasar tradisional adalah tempat dimana penjual dan pembeli bertemu dan dicirikan oleh transaksi penjual dan pembeli langsung dan biasanya proses tawar menawar. Bangunan biasanya terdiri dari warung atau gerai, stand dan pangkalan terbuka yang dibuka oleh vendor dan manajer pasar. Sebagian besar menjual kebutuhan pokok seperti makanan berupa ikan, buah-buahan, sayur mayur, telur, daging, kain, pakaian, produk dan jasa elektronik. Selain itu, ada juga yang menjual kue dan produk lainnya. Pasar seperti ini masih tersebar luas di Indonesia. Umumnya terletak di dekat pemukiman warga sehingga memudahkan pembeli menjangkau pasar. (Rechtsordnung, 2019)

Dalam proses pendistribusiannya dimulai dengan petani menjual hasil pertaniannya langsung ke pembeli dalam jumlah besar, untuk didistribusikan kembali ke eceran di tempat lain. Umumnya barang dagangan atau bahan jualan segar diletakkan di atas tanah yang hanya beralaskan terpal, plastik atau sejenisnya, ditumpuk dalam keranjang hingga tumpah di jalan. Pasar yang menjual barang sampai tumpah ke jalan. Pasar tradisional di mana terdapat aktivitas ekonomi permintaan-penawaran, dengan sistem transaksi yang dilakukan secara tunai, dan dapat dilakukan negosiasi negosiasi untuk berbagai kebutuhan.(Ayu & Alibasyah, 2020)

Pasar tradisional memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positif pasar secara umum adalah menaikkan pajak daerah, menyerap tenaga kerja di area pasar dan memudahkan warga sekitar untuk membeli kebutuhan pangan sehari-hari. Dampak negatif terhadap lingkungan dengan adanya pasar adalah pemborosan akibat aktivitas jual beli di pasar. Sampah pasar berupa sisa sayur, buah dan makanan lainnya dapat membusuk dan menimbulkan bau tidak sedap. Produk pangan yang tidak terjual juga menjadi limbah yang dapat mencemari pasar. Kebiasaan membuang sampah dengan cara yang tidak tepat juga dapat menurunkan nilai estetika pasar. Selain itu, sampah juga dapat menyebabkan pencemaran air dan kerusakan tanah. Pencemaran air disebabkan oleh sampah organik yang umumnya berupa sampah yang dapat membusuk atau terdegradasi oleh mikroorganisme.

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menjelaskan bahwa sampah merupakan hasil sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alamiah yang berwujud padat.

Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 20 tahun 2011 pasal 23 tentang manipulasi Sampah yang mengacu pada UU no. 18 tahun 2008 yang termasuk klasifikasi dalam bentuk pengelompokan, koleksi di formulir rekrutmen, transportasi masuk cara mengangkut sampah dari sumbernya, pengolahan dalam bentuk perubahan karakteristik komposisi dan kuantitas, pengolahan sampah akhir berupa pengembalian limbah yang aman.

Berdasarkan data yang diperoleh melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir 2019 jumlah pertumbuhan sampah pada

periode tersebut 3 tahun terakhir, yaitu dari 2017 hingga 105.446 ton, 2018 hingga 106.784 Ton, 2019 hingga 108.139 Ton dengan hanya 1 tempat pembuangan sampah di ibu kota kecamatan dari 20 kecamatan yang menyusunnya.

Menurut data Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir 2019, data 10 penyakit terbesar bulan Januari sampai dengan bulan Desember dalam kurun 3 tahun terakhir yaitu penyakit ISPA tahun 2017 (43.721), tahun 2018 (35.591) dan tahun 2019 (26.368). Penyakit Dermatitis dan Eksim tahun 2017 (10.997), tahun 2018 rawat jalan (8025), tahun 2019 (4302). Penyakit Diare tahun 2017 (10.599), tahun 2018 rawat inap (80) dan rawat jalan (9.904), tahun 2019 (6.307).

Berdasarkan fenomena yang ada Pengamatan awal dilakukan di masyarakat tentang pengelolaan sampah di Kabupaten Indragiri Hilir dan terlihat bahwa pemilahan sampah dilakukan dengan pemulung yang ada tidak dibuat oleh masyarakat sebagai aktor utama sehingga Sampah yang dapat terurai dan tidak dapat terurai bercampur di dalam mobil pengumpul sampah, pengumpulan sampah dari sumbernya belum sepenuhnya diterapkan terutama sampah rumah tangga pengambilan hanya dilakukan di perumahan di pinggir jalan raya, pasar dan tempat yang mudah dilalui truk sampah orang berkumpul dalam wadah berupa kantong plastik, tong sampah, TPS pasar, pengangkutan sampah dari TPS ke TPA dilakukan langsung oleh petugas kebersihan 5 orang di dalam mobil bak terbuka milik Pemkab DLHK Indragiri Hilir pagi dan siang dan sore hari kemudian sampah dikirim ke TPA di sungai beringin, pengolahan sampah dibuat oleh masyarakat, yaitu bank sampah dan pengomposan tapi hasilnya tidak berfungsi lagi, pemusnahan akhir / pemrosesan akhir sampah di Kabupaten

Indragiri Hilir masih menggunakan tehnik Open Dumping yang seharusnya sudah menggunakan tehnik Sanitary Landfill tetapi perencananya tahun 2020 akan dilakukan pemusnahan akhir dengan tehnik Sanitary Landfill.(Fatma & Fatmawati, 2020)

Dan juga disebutkan dalam Peraturan Bupati Indragiri Hilir No 20 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah. Sampah para pedagang yang tidak sepenuhnya di buang ketempat pembuangan akhir membuat penumpukan dan penyumbatan pada selokan sekitar pasar tersebut, akibat nya pasar terlihat kotor dan akan berdampak menimbulkan berbagai macam penyakit. Tidak terlihat nya tempat pembuangan seperti tong sampah, Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sehingga para pedagang membuang sampah di belakang tempat mereka berdagang. Hal ini yang mengakibatkan penumpukan sampah yang banyak.

Tabel I.I : Data Jumlah Timbulan Sampah Di Kabupaten Indragiri

Hilir

No	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Tahun 2018 (jiwa)	Jumlah Timbulan Sampah Penduduk/hari (ton)	Jumlah Penanganan Sampah/hari (ton)	Jumlah Sampah yang tidak tertangani/hari (ton)	Jumlah Sampah yang tidak tertangani/tahun (ton)
1	Keritang	67.616	27	-	-	-
2	Kemuning	34.388	14	-	-	-
3	Reteh	46.077	18	-	-	-
4	Sungai Batang	12.892	5	-	-	-
5	Enok	36.042	14	-	-	-
6	Tanah Merah	32.470	13	-	-	-
7	Kuala Indragiri	20.435	8	-	-	-
8	Concong	14.156	6	-	-	-
9	Tembilahan	77.135	31	22	9	3.341
10	Tembilahan Hulu	47.585	19	13	6	2.093
11	Tempuling	32.569	13	-	-	-
12	Kempas	36.194	14	-	-	-
13	Batang Tuaka	29.139	12	-	-	-
14	Gaung Anak Serka	23.221	9	-	-	-
15	Gaung	42.367	17	-	-	-
16	Mandah	41.520	17	-	-	-
17	Kateman	48.711	19	-	-	-
18	Pelangiran	47.604	19	-	-	-
19	Teluk Belengkong	17.987	7	-	-	-
20	Pulau Burung	23.288	9	-	-	-
Total		731.396	293	35	15	5.434

Sumber : BPS INHIL 2019

Pada table diatas dapat dilihat bahwasanya timbulan sampah Kecamatan Enok pada data 2019 sejumlah 14 ton/hari, Namun yang terjadi dilapangan belum adanya penanganan yang serius baik dari pihak Kecamatan maupun pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir dalam penanganan sampah di Kecamatan Enok.

Kelurahan Enok merupakan ibu kota Kecamatan Enok, memiliki pasar tradisional yang di bangun pada tahun 1983 dan hanya setiap hari rabu pasar

tradisional ini buka/beroperasi. Pasar ini di kelola oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Indragiri Hilir dan Kecamatan Enok.

Tabel I.II : Data Pasar Kelurahan Enok

Nama Pasar	Luas	Jumlah Pedagang	Jumlah Kios	Jumlah Los	Lapak/ Pelataran
Pasar Tradisional	242 M × 50 M	± 122 Orang	2 Unit	5 Unit	28 Lapak

Sumber : Kecamatan Enok Tahun 2018

Setiap pedagang akan di kenakan tarif Retribusi sebesar Rp. 5.000-, yang mana Rp. 3000-, akan di gunakan untuk kebersihan pasar dan Rp. 2000-, sebagai retribusi ke Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang mana akan di pegang sementara oleh pihak Kecamatan dan akan di setorkan kepada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Indragiri Hilir pada minggu ke-4 atau perbulan.

Terkait mengenai pengelolaan sampah di pasar tradisional kelurahan enok tidak terjadinya pengelolaan yang baik, tidak adanya tong/tempat sampah disekitar pedagang, tidak adanya TPS maupun TPA dan juga tidak ada nya pengangkutan sampah hasil dari pasar. Sampah hasil pasar yang berbahan kertas maupun plastik langsung dibakar disekitar lapak pedagang dan yang berjenis sayuran akan dimakan oleh hewan.

Dalam penjelasan sebelumnya dan berdasarkan pengamatan awal maka penulis jelaskan beberapa fenomena penelitian yaitu:

1. Terindikasi masih minimnya partisipasi dari stakeholder dalam menyediakan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Kelurahan Enok.

2. Terindikasi masih Rendahnya Pemahaman pengelolaan sampah oleh stakeholder yang mengakibatkan sampah yang tertumpuk diselokan, hal ini yang membuat selokan menjadi tersumbat dan membuat lingkungan tercemar.
3. Terindikasi masih kurangnya pertanggung jawaban dari stakeholder dalam pengelolaan sampah, sehingga menimbulkan pengelolaan sampah yang tidak tertata dengan baik di pasar Kelurahan Enok.

Berdasarkan dari fenomena yang penulis temukan di lapangan, maka penulis tertarik untuk menelitinya lebih lanjut dengan judul : “ **Tata Kelola Sampah Oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Studi di Pasar Tradisional Kelurahan Enok).**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang dikemukakan diatas, serta fenomena atau gejala yang telah diuraikan maka rumusan masalah penelitian yang penulis teliti adalah ” Bagaimana Tata Kelola Sampah Oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Studi di Pasar Tradisional Kelurahan Enok).”

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian:
 - a. Untuk mengetahui bagaimana Tata Kelola Sampah Oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Studi di Pasar Tradisional Kelurahan Enok)

- b. Untuk mengetahui Hambatan Tata Kelola Sampah Oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Studi di Pasar Tradisional Kelurahan Enok).

2. Kegunaan Penelitian:

- a. Aspek Akademis, sebagai salah satu bahan informasi dan data sekunder bagi kalangan akademis lainnya agar dapat memberikan kontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung bagi kepustakaan sehingga dapat menambah bahan kajian perbandingan bagi yang tertarik dalam bidang ini.
- b. Aspek Teoritis, sebagai bahan manfaat penelitian agar dapat mengembangkan teori-teori yang telah ada sehingga memperkaya hasil-hasil ilmu pengetahuan baru dalam pengembangan bidang ilmu pemerintahan.
- c. Aspek Empiris, sebagai bahan masukan bagi instansi terkait dalam pengambilan kebijakan pemerintah khususnya dalam pengelolaan sampah.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIRAN

A. Studi Kepustakaan

Dalam suatu penulisan karya ilmiah atau sebuah penulisan diperlukan konsep landasan atau pijakan sebagai pedoman dan acuan berfikir penulis dalam memecahkan masalah pokok yang diajukan dalam penelitian ini penulis akan memaparkan konsep-konsep atau teori-teori yang ada relevansinya untuk mendukung pemecahan masalah yang dikemukakan diatas.

2.1 Konsep Pemerintahan

Secara etimologis, kata pemerintah berasal dari kata perintah yang kemudian mendapat awalan pe- dari kata pemerintah, sehingga pemerintah berarti badan atau organ elit yang melaksanakan tugas penyelenggaraan negara, selain mendapatkan akhiran -an kata pemerintahan, yang berarti perihal, cara, perbuatan atau urusan dari badan yang berkuasa dan memilih legitimasi. Selain itu, Syafiie menjelaskan bahwa ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mengkaji bagaimana melakukan koordinasi dan kemampuan memimpin bidang legislasi, eksekutif dan yudikasi, dalam hubungan pusat dan daerah, antar lembaga serta antar yang memerintah dengan yang diperintah. (Rusadi et al., 2019) (*Executive heavy*)

Pemerintah pada umumnya dalam Bahasa Inggris disebut government, yaitu: institusi dan perangkat yang mereka miliki tanggung jawab menjaga negara dan memuaskan keinginan masyarakat, kecenderungan mereka lebih fokus ke eksekutif (*Executive heavy*). "Pemerintah" atau "pemerintahan" adalah dua kata yang berasal dari suku kata "perintah" yang berarti sesuatu yang harus dilakukan.

Pemerintah dalam pengertian yang paling dasar didefinisikan sebagai sekelompok orang yang memiliki amanat orang yang sah untuk dijalankan kekuasaannya dalam urusan Pemerintah. Definisi ini menunjukkan gambar adanya hubungan "kontrak sosial" antara orang-orang sebagai pemberi mandat dan pemerintah sebagai pelaksana mandat.

Berbeda dengan istilah *governance*, maknanya lebih kompleks (*Complicated*) karena sehubungan dengan beberapa persyaratan yang terkandung dalam terminologinya, yaitu *government*, *world government* bisnis / bisnis (swasta, *commercial society*) dan orang (*public*). Pemerintahan yang bagus (*Good governance*) hanya berarti ya Keberadaannya didukung oleh lembaga-lembaga yang melibatkan kepentingan publik.

Pemerintah dalam paradigma lama memiliki objek material negara sehingga pemerintah berorientasi pada kekuasaan, namun dalam paradigma baru pemerintah dipandang sebagai objek material masyarakat, sehingga pemerintah dimaknai sebagai manajemen. dari kehidupan masyarakat dalam suatu pemerintahan / negara. (Munaf,2016:47)

Menurut Maulidiah dalam (Rauf, 2017) bahwa, Pemerintah secara umum adalah organisasi atau lembaga yang diberi legitimasi (legalitas) oleh rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi untuk menjalankan tugas pemerintahan (kekuasaan negara) di suatu negara dan diberkahi dengan perangkat negara. Dengan demikian dapat diartikan bahwa unsur pokok suatu pemerintahan berupa organisasi atau lembaga, organisasi atau lembaga yang mendapat legitimasi berupa kewenangan dari masyarakat melalui proses pemilihan umum dan

dilengkapi dengan aparatur negara sebagai unsur pendukung dalam penyelenggaraannya. dari tugas mereka. tugas pemerintah. Oleh karena itu, administrasi publik tidak lain adalah menjalankan fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif sesuai dengan kewenangan masing-masing lembaga sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan setiap orang akan pelayanan publik dan pelayanan sipil dalam hubungan pemerintahan (agar dapat diterima) ketika dibutuhkan oleh yang bersangkutan. Pemerintah memiliki dua fungsi dasar yaitu yang pertama **fungsi primer atau fungsi pelayanan dan yang kedua fungsi sekunder atau fungsi pemberdayaan.**

Menurut Surbakti dalam (Shalfiah, 2013) mengatakan istilah pemerintah dan pemerintahan memiliki arti yang berbeda, dimana pemerintahan adalah tentang tugas dan wewenangnya, sedangkan pemerintah adalah aparatur yang menjalankan tugas dan wewenang negara. Jadi istilah pemerintahan sendiri dapat dikaji atau dilihat dari tiga aspek yaitu: Ditinjau dari aspek kegiatan (dinamika), pemerintahan berarti segala kegiatan atau usaha yang terorganisasikan bersumber pada kedaulatan dan berlandaskan pada dasar negara.

- a. Ditinjau dari aspek struktural fungsional, pemerintahan mengandung arti seperangkat fungsi negara, yang satu sama lain saling berhubungan secara fungsional, dan melaksanakan fungsinya atas dasar-dasar tertentu demi tercapainya tujuan negara.

- b. Ditinjau dari aspek tugas dan kewenangan negara, maka pemerintahan berarti seluruh tugas dan kewenangan negara. Pemerintahan adalah cara pemerintah memegang wewenang ekonomi, politik, administrasi guna mengelola urusan-urusan negara untuk kesejahteraan masyarakat.

Pemerintahan adalah gejala yang tak terhindarkan dimana pun dan kapan pun kita berada. Ia tak dapat dilepaskan begitu saja dari ruang kehidupan, disebabkan kebutuhan kita akan hadirnya pemerintahan yang mampu melaksanakan fungsinya dengan baik. Pemerintahan yang baik hanya mungkin jika ia terlahir dari masyarakat yang baik. Masyarakat yang baik hanya mungkin terdiri dari jika ia berasal dari individu individu yang baik. Individu yang baik hanya mungkin jika ia berasal dari keluarga yang terbaik. Dalam basis ini keluarga menjadi basis sosiologis tumbuhnya pemerintahan. Labolo (2007).

Pemerintahan adalah orang yang mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan publik dan wajib menyelenggarakan pelayanan sipil untuk semua melalui hubungan dengan pemerintah, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya bila diperlukan, sesuai dengan tuntutan yang diperintah.

Menurut Poerwadarmita (2006: 141) yaitu sebagai berikut:

- a. Perintah adalah perkataan yang bermaksud menyuruh melakukan sesuatu.

- b. Pemerintah adalah kekuasaan perintah suatu Negara (Daerah, Negara) atau badan yang tertinggi yang memerintah suatu Negara (seperti kabinet merupakan suatu pemerintah).
- c. Pemerintahan adalah manajemen tata kelola pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga yang sederajat yang terkait guna mencapai tujuan negara itu sendiri. (cara, hal, urusan dan sebagainya) memerintah.

Menurut Syarifin dalam (Astomo, 2014) Pengertian pemerintahan dalam arti luas adalah pengertian pemerintahan berdasarkan teori klasik yang dikemukakan oleh Montesqieu dalam bukunya "*L'Esprit des Lois*" (jiwa hukum) yang dikembangkan oleh Immanuel Kant sebagai trias politik yang membagi kekuasaan negara (membagi tugas pemerintah). di tiga wilayah kekuasaan negara di tiga bidang utama, yang masing-masing tidak bergantung pada kekuasaan lainnya. Daya hanya memiliki 1 (satu) fungsi:

1. Kekuasaan legislatif menjalankan fungsi membentuk undang-undang.
2. Kekuasaan eksekutif menjalankan undang-undang/pemerintahan.
3. Kekuasaan yudikatif menjalankan fungsi peradilan.

3.2.Konsep Ilmu Pemerintahan

Sejarah ilmu pemerintahan di Indonesia diawali pada tahun 1950 dengan dibukanya jurusan ilmu pemerintahan di Universitas Gajah Mada sebagai Universitas Tertua Di Indonesia. Namun pada masa ini masih jarang ditemukan buku-buku khusus yang membahas tentang pemerintahan karena kajian dan tulisan tentang pemerintahan ada di dalam berbagai karya ilmiah bidang hukum

dan politik. Pemerintahan berasal dari kata pemerintah, yang dimana dari kata “perintah” tersebut memiliki empat unsur yakni sebagai berikut, ada dua pihak yang terkandung, kedua pihak tersebut saling memiliki hubungan, pihak yang memerintah memiliki wewenang, dan terakhir pihak yang diperintah memiliki ketaatan.

Selanjutnya menurut ndraha (2011:17) juga menjelaskan bahwa ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melindungi dan memenuhi tuntutan setiap orang terhadap jasa publik maupun jasa civil dalam penyelenggaraan suatu pemerintahan sehingga dapat bermanfaat saat dibutuhkan oleh pihak yang berkaitan.

Selanjutnya menurut Wasistiono (2015:61) mendeskripsikan bahwa ilmu pemerintahan ialah ilmu yang mempelajari bagaimana suatu organisasi yang tertinggi dalam suatu negara yaitu pemerintahan dalam menjalankan hak dan kewajibannya kepada negara yang berhubungan langsung dengan masyarakatnya sendiri. Sedangkan pandangan Muhadam Labolo pemerintahan sesungguhnya ialah sebagai upaya dalam mengelola kehidupan bersama secara baik dan benar untuk mencapai tujuan yang diinginkan atau disepakati secara bersama. Pemerintahan sendiri dapat ditinjau dari berbagai aspek penting seperti kegiatan (dinamika), struktur fungsional, maupun tugas dan kewenangan.

Tujuan utama untuk memebentuk pemerintahan ialah untuk menjaga suatu sistem ketertiban didalam masyarakat sehingga bisa menjalankan kehidupan secara wajar. Dan pemerintah modern pada hakekatnya adalah pelayanan

masyarakat, menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya demi kemajuan bersama.

Secara strukturnya pemerintahan di Indonesia terbagi atas pemerintah dan pemerintah daerah. Pemerintah ialah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Sedangkan pemerintah daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ilmu pemerintahan ialah ilmu terapan yang mempelajari bagaimana kegiatan- kegiatan kenegaraan dalam rangka pemenuhan kepentingan masyarakat secara menyeluruh serta suatu ilmu yang tentang bagaimana cara manusia bersedia diperintah dan memberi perintah.

3.3.Konsep Pemerintahan Daerah

Konsep pemerintahan daerah berasal dari terjemahan konsep *local government* yang pada intinya mengandung tiga pengertian, yaitu: pertama berarti pemerintah lokal, kedua berarti pemerintahan lokal, dan ketiga berarti wilayah lokal (Hoessein dalam Hanif, 2007:24). Pada aspek pertama, mengacu pada pemerintah daerah Organisasi / lembaga / lembaga yang bertanggung jawab menyelenggarakan pemerintahan daerah. Dalam hal ini pemerintah daerah atau pemerintah daerah Dalam organisasi yang memimpin pelaksanaan kegiatan pemerintahan daerah, Dalam pengertian ini, di Indonesia mengacu pada kepala daerah dan dewan Perwakilan masyarakat daerah. Kedua lembaga ini yang menggerakkan kegiatan pemerintahan daerah sehari-hari. Oleh karena itu, kedua

lembaga ini dimaknai dengan Pemerintah daerah (*local government atau local authority*).

Pemerintah daerah dalam pengertian kedua mengacu pada kegiatan Tata kelola dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Untuk melaksanakan pemerintah daerah, pemerintah daerah melakukan kegiatan regulasi. Kegiatan ini merupakan fungsi penting yang pada hakikatnya merupakan fungsi untuk pembuatan kebijakan pemerintah daerah yang dijadikan dasar atau arah dalam menyelenggarakan pemerintahan.

Pemerintah daerah dalam pengertian ketiga mengacu pada wilayah Pemerintah atau daerah otonom di Indonesia. Merupakan wilayah dengan hak untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintah diserahkan oleh pemerintah pusat kepada masing-masing daerah. Melakukan pekerjaan rumah tangga. Hak pengelolaan ini tercermin dalam Merumuskan peraturan daerah yang pada dasarnya merupakan kebijakan umum Pemerintah daerah berhak mengurus rumah tangganya dalam penyelenggaraan pemerintahan diwujudkan dalam implementasi peraturan daerah berupa kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan pelaksanaan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan masyarakat.

Pemerintah Daerah di Indonesia adalah penyelenggara pemerintahan daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang,serta kewajiban bagi daerah yang telah diberikan otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan,serta kepentingan masyarakat setempat. dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia,Pemerintahan Daerah ini menggunakan asas-asas sebagai berikut :

1. Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah. Pasal 1 angka (7) UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
2. Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.
3. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada Gubernur dan Bupati/Wali Kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.
4. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom agar melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada

Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.

5. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Secara historis eksistensi pemerintahan daerah telah dikenal sejak zaman pemerintahan kerajaan-kerajaan dahulu hingga pada sistem pemerintahan yang diberlakukan oleh pemerintah jajahan. Demikian pula mengenai susunan pemerintahannya dan sistem kemasyarakatan yang dimulai dari tingkat desa, kampung, nagari, bahkan dengan istilah lainnya sampai pada puncak pimpinan pemerintahan. Disamping itu upaya membuat perbandingan sistem pemerintahan yang berlaku di beberapa negara lain, juga amat penting untuk dijadikan pertimbangan bagi pembentukan pemerintahan daerah. Berdasarkan latar belakang sejarah di atas, maka pemerintah Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, merancang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang didalamnya mengatur secara eksplisit tentang pemerintahan daerah. Hal-hal ini terlihat dalam pola pikir dan usulan-usulan yang terungkap sewaktu para pendiri Republik (*the founding fathers*) ini mengadakan sidang-sidang dalam mempersiapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesianya. Disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 merupakan awal mula peraturan tentang pemerintahan daerah di

Indonesia sejak kemerdekaan. Ditetapkannya Undang-Undang tentang pemerintahan daerah tersebut merupakan resultant dari berbagai pertimbangan tentang sejarah pemerintahan kita dimasa kerajaan-kerajaan serta pada masa kolonialisme.

Dengan demikian dikeluarkan produk hukum selanjutnya tentang Pemerintahan daerah hingga terakhir di tahun 2014 ialah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kemudian lebih lanjut didalam bagian penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dijelaskan bahwa Penyelenggaraan pemerintahan daerah berbeda dengan penyelenggaraan pemerintahan di pusat yang terdiri atas lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh DPRD dan kepala daerah. DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang diberi mandat rakyat untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah. Dengan demikian maka DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai mitra sejajar yang mempunyai fungsi yang berbeda.

DPRD mempunyai fungsi pembentukan Perda, anggaran dan pengawasan, sedangkan kepala daerah melaksanakan fungsi pelaksanaan atas Perda dan kebijakan Daerah. Dalam mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah tersebut, DPRD dan kepala daerah dibantu oleh Perangkat Daerah. Provinsi adalah suatu satuan dari teritorial yang dijadikan sebagai nama dari sebuah wilayah administratif yang berada di bawah wilayah

negara atau negara bagian. Dalam pembagian administratif, Indonesia terdiri atas provinsi, yang dikepalai oleh seorang Gubernur.

Gubernur dipilih bersama wakilnya dalam satu paket pasangan yang dipilih secara langsung oleh rakyat di provinsi setempat untuk masa jabatan lima tahun, sehingga dalam hal ini gubernur bertanggung jawab kepada rakyat. Gubernur terpilih kemudian dilantik oleh Presiden, dan dapat juga dilantik oleh Mendagri atas nama Presiden. Selain itu, gubernur juga berkedudukan sebagai wakil pemerintah pusat di wilayah provinsi bersangkutan, sehingga gubernur bertanggung jawab kepada Presiden. Gubernur bukan atasan bupati atau walikota, melainkan hanya sebatas membina, mengawasi, dan mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota. Hubungan pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten dan kota bukan subordinat, yaitu setiap pemerintahan daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Daerah provinsi selain berstatus sebagai Daerah juga merupakan Wilayah Administratif yang menjadi wilayah kerja bagi gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dan wilayah kerja bagi gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah Daerah provinsi. Daerah kabupaten/kota selain berstatus sebagai Daerah juga merupakan Wilayah Administratif yang menjadi wilayah kerja bagi bupati/wali kota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah Daerah kabupaten/kota.

Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 mengatakan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan

Pemerintahan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas - luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Otonomi berasal dari bahasa Yunani “*autonomic*” yaitu *auto* artinya sendiri dan *nomos* artinya undang - undang. Secara harfiah otonomi diartikan sebagai pemberian suatu hak dan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Menurut (Syamsyudin, 2007) desentralisasi adalah akuisisi kewenangan pemerintah dari pemerintah kepada daerah otonom dengan tujuan kelola pemerintah daerah sendiri. Desentralisasi termasuk struktur organisasi yang mendefinisikan bagaimana memberdayakan. Desentralisasi dapat mempengaruhi perkembangan suatu negara, karena dengan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah bisa membantu pemerintah pusat dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dari berbagai definisi pemerintah daerah bisa jadi disimpulkan pemerintah daerah sedang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan asas otonomi luas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3.4. Konsep Tata Kelola

Konsep *governance* pada awalnya berkembang pada tahun 1990 ditandai dengan adanya cara pandang (*point of view*) yang baru terhadap peran pemerintah

(*government*) dalam menjalankan sistem pemerintahan. Karena jika banyak yang percaya bahwa peran pemerintah atau penguasa sangat menentang kebijakan masyarakat sehingga tidak ada keluasaan dan ruang untuk perusahaan yang akan dikembangkan. Begitu juga dengan asumsi yang lain bahwa pemerintah terlihat seperti itu tahu dan mengerti apa yang dibutuhkan dari masyarakat, banyak kebijakan dibuat tanpa mendengarkan input dan aspirasi masyarakat untuk itu dari atas ke bawah dan publik hanya bisa menerima dukungan dari perusahaan menurun di hadapan pemerintah. (Budiati,2014:36)

Tata Kelola dilakukan oleh suatu organisasi, lembaga dan masyarakat untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Dengan tata kelola dalam pemerintahan yang baik maka akan terciptanya pemerintahan yang baik.

Menurut Akhmadi (2004) tata kelola pemerintahan merupakan suatu pelayanan publik yang efisien, sebuah sistem peradilan yang dapat dipercaya, dan sebuah sistem pemerintahan yang bertanggung jawab kepada publik. tata kelola pemerintahan yang baik adalah mampu menciptakan pembangunan yang baik serta membuat dan menciptakan lingkungan yang mendukung berlangsungnya pembangunan yang kuat dan merata.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia dalam KoAk (2002: 55) prinsip mengandung arti "asas" (kebenaran bahwa menjadi dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya). Secara harfiah, prinsipnya bisa ditafsirkan sebagai dasar untuk mengemudi yang dijunjung tinggi oleh seseorang atau kelompok karena dianggap benar.

Di luar itu, juga berbicara tentang bagaimana prinsip diterapkan secara seimbang dan diselaraskan agar tidak menimbulkan kekacauan dan ketidaksetaraan (*overlapping*) dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Lembaga Administrasi Negara memberikan arti *Good Governance* adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang kuat dan bertanggung jawab, efisien dan efektif, menjaga sinergi interaksi konstruktif antar domain Negara, swasta dan masyarakat. (Munaf et al., 2018)

Menurut Goran Hyden dalam (Dwipayana, 2003:10) secara komprehensif mengidentifikasi 3 dimensi besar dalam konteks *governance*. Yaitu :

- a. Aktor, Dimensi aktor mencakup kekuasaan, kewenangan, resiprositas dan pertukaran
- b. *Structural*, Dimensi structural mencakup elemen elemen seperti *compliance* (ketulusan), *trust* (kepercayaan). Akuntabilitas dan inovasi
- c. *Empiric*, Dimensi empirik *governance* mencakup tiga elemen utama : pengaruh warga negara resiprositas sosial serta kepemimpinan yang responsive serta bertanggung jawab.

Menurut Koiman (2009:273), *governance* merupakan serangkaian proses interaksi sosial politik antara pemerintah dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan-kepentingan tersebut. *Governance* merupakan mekanisme-mekanisme, proses-proses dan institusi-institusi melalui warga Negara mengartikulasi kepentingan-kepentingan mereka, memediasi perbedaan-perbedaan mereka serta menggunakan hak dan kewajiban legal mereka.

Chhotray dan Stoker (2014) mengenai Tata Kelola adalah tentang aturan pengambilan keputusan kolektif dalam pengaturan karena ada pluralitas/kemajemukan aktor atau organisasi dan karena tidak ada sistem control formal yang dapat menentukan hal hubungan antara para aktor dan organisasi tersebut. dengan demikian tata kelola mengafirmasi bahwasanya yaitu suatu keputusan bersama antara aktor yang terlibat didalam sebuah organisasi tersebut.

Dalam peraturan pemerintah nomor 101 Pada tahun 2000 prinsip-prinsip pemerintahan yang baik keduanya terdiri dari:

1. Profesionalisme, kapasitas lebih besardan moral penyelenggara pemerintahan yang ingin dicapai memberikan pelayanan yang mudah, cepat dan akurat, dengan biaya yang terjangkau.
2. Tanggung jawab, tanggung jawab pemangku kepentingan yang lebih besar pengambil keputusan di segala bidang menyangkut kepentingan perusahaan.
3. Transparansi, menumbuhkan rasa saling percaya batik antara pemerintah dan masyarakat melalui memberikan informasi dan garansi akses mudah ke informasi tepat dan memadai.
4. Pelayanan prima, layanan pengiriman publik yang mencakup praktik yang baik, kejelasan tarif, kepastian waktu, kenyamanan akses, keutuhan sarana dan prasarana, dan pelayanan yang ramah dan disiplin.
5. Demokrasi dan partisipasi, mendorong semua orang warga negara untuk menggunakan haknya dalam mengungkapkan pendapat dalam proses pengambilan keputusan, yang menyangkut kepentingan umum langsung atau tidak langsung.

6. Efisiensi dan efektivitas, jaminan pelaksanaan pengabdian masyarakat menggunakan sumber daya tersedia secara optimal dan bertanggung jawab.
7. Supremasi hukum dapat diterima oleh seluruh masyarakat, untuk menciptakan penerapan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa kecuali, membela hak asasi manusia dan memperhatikan nilai-nilai kehidupan di masyarakat.

Sedangkan menurut Santosa (2008) dalam rangka mendukung terwujudnya Tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan desa, pengelolaan keuangan desa dilakukan berdasarkan prinsip tata kelola yaitu :

- a. Transparan

Menurut Mahmudi (2011) Transparansi memiliki arti Transparan merupakan keterbukaan organisasi dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang menjadi pemangku kepentingan. Transparansi juga berarti adanya penjelasan manajemen organisasi sektor publik tentang aktivitas, program, dan kebijakan yang sudah, sedang dan akan dilakukan beserta sumber daya yang digunakan. Transparansi pengelolaan keuangan publik merupakan prinsip Good Governance yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik. Dengan dilakukannya transparansi tersebut publik akan memperoleh informasi yang aktual dan faktual.

- b. Akuntabel

Menurut Sujarweni (2015:28) menyatakan akuntabilitas Merupakan suatu bentuk keharusan seseorang (pimpinan /pejabat/ pelaksana) untuk menjamin bahwa tugas dan kewajiban yang diembannya sudah dilaksanakan sesuai

ketentuan yang berlaku. Akuntabilitas dapat dilihat melalui laporan yang tertulis yang informatif dan transparan.

Mardiasmo (2002) akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan dan mengungkapkan segala aktivitasnya dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan.

c. Patisipatif

Sujarweni (2015) mendefinisikan yang dimaksud dengan partisipatif adalah prinsip dimana bahwa setiap warga desa pada desa yang bersangkutan mempunyai hak untuk terlibat dalam setiap pengambilan keputusan pada setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dimana mereka 16 tinggal. Keterlibatan masyarakat dalam rangka pengambilan keputusan tersebut dapat secara langsung dan tidak langsung.

d. Tertib dan disiplin Anggaran

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa tertib dan disiplin anggaran adalah pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

3.5. Konsep Sampah

Menurut Defenisi World Health Organization (WHO) sampah adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya. berasal dari kegiatan yang di lakukan oleh manusia termasuk kegiatan industry.

Undang-Undang Pengelolaan Sampah No 18 tahun 2008 menyatakan sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau dari proses alam yang berbentuk padat. Selanjutnya pengertian yang sama tentang sampah menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia sampah adalah suatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi atau sesuatu yang berasal dari aktivitas manusia. jenis sampah yang dikelola terdiri atas :

1. Sampah rumah tangga Sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
2. Sampah sejenis sampah rumah tangga Sampah yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan atau fasilitas lainnya.
3. Sampah spesifik Sampah yang mengandung B3, limbah B3, sampah yang timbul akibat bencana, puing bongkaran bangunan, sampah yang secara teknologi belum dapat diolah dan atau sampah yang timbul secara tidak periodic.

Menurut Putri Lianandari, berdasarkan sifatnya sampah terdiri atas sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik adalah sampah yang mudah membusuk seperti sisasisa makanan, sayuran, daun-daun kering, dan sebagainya. Sampah anorganik adalah sampah yang tidak mudah membusuk, seperti plastik wadah pembungkus makanan, kertas, plastik mainan, botol dan gelas minuman, kaleng, kayu, dan sebagainya. Sampah jenis ini dapat didaur ulang kemudian dijual (Lianandari, 2011 : 9)

Besaran dan komposisi sampah yang dihasilkan dalam suatu wilayah ditentukan oleh beberapa factor yaitu:

1. jumlah penduduk dan tingkat pertumbuhannya
2. tingkat pendapatan dan pola konsumsi masyarakat
3. Pola penyediaan kebutuhan hidup penduduknya
4. iklim dan musinm.

Pengelolaan sampah adalah pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan, pendaur-ulang atau pembuangan material sampah. Kalimat ini biasanya mengacu pada material sampah yang dihasilkan dari kegiatan manusia, dan biasanya dikelola untuk mengurangi dampaknya terhadap lingkungan, kesehatan dan keindahan. Pengelolaan sampah biasanya melibatkan zat padat, cair, gas, atau radio aktif dengan metode dan keahlian khusus untuk masing-masing zat. Adapaun metode pengelolaan sampah di TPA adalah sebagai berikut :

1. *Open Dumping*

Yaitu pembuangan sampah dengan penumpukan diatas tanah terbuka tanpa dilapisi oleh lapisan apapun. Dengan cara ini TPA memerlukan tanah yang luas dan sampah ditumpuk begitu saja tanpa adanya perlakuan. Metode ini berpengaruh buruk di area sekitarnya terhadap lingkungan, sumber penyakit serta tempat binatang bersarang. Keuntungan utama dari metode ini adalah murah dan sederhana.

2. *Controlled Landfill*

Yaitu pembuangan sampah dengan cara menimbun sampah dengan tanah yang dilakukan setiap 5-7 hari sekali. Dalam operasionalnya,

untuk meningkatkan efisiensi pemanfaatan dan kestabilan permukaan TPA, maka dilakukan juga perataan dan pemadatan sampah. Metode ini merupakan perbaikan atau peningkatan dari cara open dumping tetapi belum sebaik sanitary landfill

3. *Sanitary Landfill*

Yaitu pembuangan sampah dengan cara menimbun sampah yang dilakukan lapis demi lapis setiap hari, sehingga tidak sampai menimbulkan bau serta tidak menjadi tempat binatang bersarang. Metode ini merupakan cara yang ideal namun memerlukan biaya investasi dan operasional yang tinggi.

3.6.Konsep Pasar

Pasar merupakan salah satu pusat perbelanjaan yang menyediakan atau menjual berbagai bahan pangan dan benda-benda lain yang di butuhkan masyarakat sebagai keperluan untuk hidup,pasar juga meupakan salah satu dari berbagai institusi, sistem, hubungan sosial, sistem dan infrastruktur tempat masyarakat berdagang atau tempat usaha yang di mana kita dapat menemukan para pedagang menawarkan mulai dari barang hingga jasa dan tenaga kerja dengan imbalan uang karena yang kita tahu sekarang orang-orang memberi imbalan dengan uang beda halnya dengan pada zaman dahulu masyarakat membayar barang atau jasa dengan barang atau jasa juga, yang kita sebut dengan sistem barter.

Pasar merupakan area tempat jual beli barang yang dimana barang yang di jual bukan hanya satu barang tetapi ada banyak jenis barang yang di jual,mulai

dari penjualan bahan pangan seperti ikan, ayam, daging dan lain lain dan juga pasar menjual barang berupa pakaian hingga barang-barang elektronik. pusat perbelanjaan yang kita kenal bukan hanya pasar tradisional saja, tetapi ada banyak pusat perbelanjaan mulai dari pasar tradisional, pertokoan, mall, plaza, dan sebutan lainnya yang menawarkan barang-barang yang sama hanya saja dari satu tempat dengan tempat yang lain hanya berbeda kualitasnya saja.

Pasar secara umum merupakan tempat transaksi di mana sekumpulan orang melakukan transaksi dengan berjualan dan membeli barang atau jasa yang tentunya mereka mendapatkan atau saling menguntungkan, bukan hanya pembeli dan pedagang saja yang diuntungkan tetapi pasar juga merupakan salah satu faktor meningkatkan perekonomian suatu daerah.

Menurut William J. Stanton (1996:2) makna dari pasar adalah kumpulan dari masyarakat yang bertujuan untuk mendapatkan rasa puas. penggunaan uang untuk ditukar dengan barang yang mereka inginkan. pasar merupakan seperangkat pembeli aktual dan juga potensi dari suatu produk atau jasa.

a. Segi ekonomi

Tempat transaksi yang dimana ada penjual dan pembeli sebagai produsen dan konsumen yang merupakan komoditas di mana pasar merupakan wadah untuk transaksi itu berlangsung dan juga sebagai demand dan supply selain itu juga merupakan salah satu pendapatan ekonomi negara misalnya dari pajak pasar.

b. Segi sosial budaya

Merupakan salah satu tradisi suatu masyarakat atau suatu kebiasaan secara sosial yang dimana adanya interaksi antara si pembeli dan si penjual atau antara komunitas pada sektor informal dan formal

c. Segi arsitektur

Menunjukkan bangunan dan tempat di setiap daerah yang di namakan pasar berbeda-beda ada yang di daerahnya pasarnya berbentuk bangun biasa ada yang sedikit unuk dan ada juga yang menggunakan pasar terapung yang di mana pasarnya berada di atas air.

Dalam menjalankan perannya sebagai pelayan publik, pemerintah sebagai aktor pembangunan dihadapkan pada berbagai masalah yang terjadi dalam masyarakat. Sebagai upaya menjawab permasalahan tersebut, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan atau program-program pembangunan untuk mencapai tujuan tersebut. Evaluasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Evaluasi kebijakan pengelolaan sampah bertujuan untuk untuk meningkatkan kinerja serta kualitas layanan pemerintah dalam mengelola sampah. Seiring dengan perkembangan tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan dan hasil pengelolaan kebersihan yang diberikan oleh pemerintah , dan dalam rangka mencapai tujuan Pemerintah Daerah dalam hal kebersihan melalui kebijakan Tempat Pengelolaan Sampah Kota Palu maka evaluasi kebijakan dalam penelitian ini dianalisis dari berbagai aspek, di antaranya efektivitas (*effectiveness*), efisiensi (*efficiency*), kecukupan (*adequacy*), perataan (*equity*), responsivitas (*responsiveness*), dan ketepatan (*appropriateness*)

B. Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	hasil penelitian
1	Muhammad Rendy	Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Palu.	Sama-sama yaitu melakukan penelitian dengan menggunakan metode kualitatif.	Penelitian terdahulu dilakukan pada tahun 2019 sementara penelitian penulis pada tahun 2020 dan Lokasi penelitian terdahulu di lakukan di Kota Palu sementara lokasi penelitian yang dilakukan penulis yaitu di Kelurahan Enok	Dalam menjalankan perannya sebagai pelayan publik, pemerintah sebagai aktor pembangunan dihadapkan pada berbagai masalah yang terjadi dalam masyarakat. Sebagai upaya menjawab permasalahan tersebut, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan atau program-program pembangunan untuk mencapai tujuan tersebut. Evaluasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Evaluasi kebijakan pengelolaan sampah bertujuan untuk untuk



meningkatkan kinerja serta kualitas layanan pemerintah dalam mengelola sampah. Seiring dengan perkembangan tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan dan hasil pengelolaan kebersihan yang yang diberikan oleh pemerintah , dan dalam rangka mencapai tujuan Pemerintah Daerah dalam hal kebersihan melalui kebijakan Tempat Pengelolaan Sampah Kota Palu maka evaluasi kebijakan dalam penelitian ini dianalisis dari berbagai aspek, di antaranya efektivitas (*effectiveness*), efisiensi (*efficiency*), kecukupan (*adequacy*), perataan (*equity*), responsivitas (*responsiveness*), dan ketepatan (*appropriateness*)

2	Eko Afriandi	Evaluasi pelaksanaan tugas unit pelaksana teknis dinas pasar kota pekanbaru pada bidang ketertiban keamanan kebersihan dan keindahan.	Sama-sama yaitu melakukan penelitian dengan menggunakan metode kualitatif	Peneliti terdahulu dilakukan pada tahun 2012 sementara penelitian penulis pada tahun 2020 dan Lokasi penelitian terdahulu di lakukan di Kota Pekanbaru sementara lokasi penelitian yang dilakukan penulis yaitu di Kelurahan Enok	Menurut SNI 19-3983-1995 tentang spesifikasi timbulan sampah untuk kota kecil dan sedang di Indonesia, katagori Kota Kecil adalah apabila jumlah penduduknya kurang dari 100.000 jiwa dan Kota Sedang adalah apabila jumlah penduduknya lebih dari 100.000 jiwa.
---	--------------	---	---	---	--

3	Setia Fajar Maulana	Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Di Kecamatan Tampan)	Sama-sama yaitu melakukan penelitian dengan menggunakan metode kualitatif	Peneliti terdahulu dilakukan pada tahun 2017 sementara penelitian penulis pada tahun 2020 dan Lokasi penelitian terdahulu di lakukan di Kota Pekanbaru sementara lokasi penelitian yang dilakukan penulis yaitu di Kelurahan Enok	Dalam menjalankan perannya sebagai pelayan publik, pemerintah sebagai aktor pembangunan dihadapkan pada berbagai masalah yang terjadi dalam masyarakat. Sebagai upaya menjawab permasalahan tersebut, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan atau program-program pembangunan untuk mencapai tujuan tersebut.
---	---------------------	---	---	---	---

4	Agung Prasetya Mayangkara	Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di TPA Gunung Panggung Kabupaten Tuban	Sama-sama yaitu melakukan penelitian dengan menggunakan metode kualitatif	Peneliti terdahulu dilakukan pada tahun 2016 sementara penelitian penulis pada tahun 2020 dan Lokasi penelitian terdahulu di lakukan di Kota Tuban sementara lokasi penelitian yang dilakukan penulis yaitu di Kelurahan Enok	Pengelolaan sampah di Kabupaten Tuban dikelola oleh Bagian Sanitasi dan pertamanan di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tuban. pengelolaan Limbah yang dihasilkan oleh subdirektori kabupaten untuk sanitasi dan lansekap. Tuban masih menggunakan pendekatan <i>end-of-pipe solution</i> berupa: kegiatan pengumpulan, pengangkutan dan pembuangan sampah juga Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah.
---	---------------------------	--	---	---	--

C. Kerangka Pikir

Gambar II.I Kerangka Pikir Penelitian Tentang Tata Kelola Sampah Oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Studi di Pasar Tradisional Kelurahan Enok).



D. Konsep Operasional

Konsep Operasional dalam penelitian ini bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman beberapa konsep ataupun istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan dalam konsep operasional sebagai berikut :

1. Pemerintah adalah suatu pengorganisasian kekuatan, tidak selalu berhubungan dengan organisasi kekuatan angkatan bersenjata, tetapi dua atau sekelompok orang dari sekian banyak kelompok yang dipersiapkan oleh suatu organisasi untuk mewujudkan hal-hal yang memberikan keterangan bagi urusan-urusan umum kemasyarakatan. Pemerintah memiliki kewajiban dalam menciptakan lingkungan yang bersih bagi masyarakat.
2. Tata kelola adalah merupakan tata pemerintahan, penggunaan wewenang ekonomi, politik, dan administrasi guna mengelola urusan-urusan Negara pada semua tingkat. Tata kelola di perlukan untuk mempermudah dan mempermudah pemerintah untuk mengelola sampah secara menyeluruh. Ada 3 Indikator menurut Goran Hyden yang pertama Aktor/Kewenangan adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintahkan orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kedua *Structural*/Pertanggung jawaban merupakan konsep etis yang dekat dengan administrasi publik pemerintahan (lembaga pemerintahan eksekutif, lembaga legislatif parlemen dan lembaga yudikatif dari Kekuasaan Kehakiman) yang memiliki beberapa arti, antara lain sering digunakan sebagai sinonim untuk konsep seperti yang dapat dipertanggung jawabkan. Dan yang ketiga *Empiric*/Pengaruh adalah kekuatan yang ada atau berasal dari sesuatu

(orang, objek) yang membantu membentuk karakter, keyakinan, atau tindakan seseorang.

3. Sampah adalah sisa-sisa bahan yang mengalami perlakuan-perlakuan, baik karena telah sudah diambil bagian utamanya, atau karena pengolahan, atau karena sudah tidak ada manfaatnya yang ditinjau dari segi social ekonomis tidak ada harganya dan dari segi lingkungan dapat menyebabkan pencemaran atau gangguan terhadap lingkungan hidup. Sampah dipasar tradisional Kelurahan Enok terdiri dari sampah non-Organik dan organic namun yang menjadi sampah dominan dipasar tersebut ialah sampah non-organik.
4. Pasar secara umum merupakan tempat transaksi di mana sekumpulan orang melakukan transaksi dengan berjualan dan membeli barang atau jasa yang tentunya mereka mendapatkan atau saling menguntungkan, bukan hanya pembeli dan pedagang saja yang diuntungkan tetapi pasar juga merupakan salah satu faktor meningkatkan perekonomian suatu daerah. Pasar Tradisional yang ada di Kelurahan Enok pusat jual beli yang hanya beroperasi sekali seminggu yakni pada hari Rabu, hal ini yang dimanfaatkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

E. Operasional Variable

Tabel II.I Tata Kelola Sampah Oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Studi di Pasar Tradisional Kelurahan Enok).

Konsep	Variabel	Indikator	Item yang dinilai
1	2	3	4
Tata Kelola (Menurut Goran Hyden, dalam Dwipayana 2003:10) Tata kelola ditentukan Oleh dimensi Aktor, dimensi Structural, dan dimensi Empiric	Pengelolaan Sampah	Aktor	<ul style="list-style-type: none">• Memastikan kewenangan stakeholder yang terlibat
		Structural	<ul style="list-style-type: none">• Memastikan pertanggungjawaban stakeholder dalam pengelolaan sampah pasar
		Empiric	<ul style="list-style-type: none">• Memastikan pengaruh stakeholder dalam pengelolaan sampah

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian Tata Kelola Sampah Oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Studi di Pasar Tradisional Kelurahan Enok) adalah metode Kualitatif.

Menurut Creswell (2016:4-5) Penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang-oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema umum, dan menafsirkan makna data. Laporan akhir untuk penelitian ini memiliki memiliki struktur atau kerangka yang fleksibel. Siapapun yang terlibat dalam bentuk penelitian ini harus menerapkan cara pandang penelitian yang bergaya induktif, berfokus pada makna individual, dan menerjemahkan kompleksitas suatu persoalan. Penelitian Kualitatif ini membantu peneliti dalam memahami suatu permasalahan ditengah-tengah masyarakat dengan cara mengeksplorasi setiap permasalahan yang timbul dan memberikan dampak bagi masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman dan mencari tentang penelitian Tata Kelola Sampah Oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Studi di Pasar Tradisional Kelurahan Enok).

B. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan permasalahan penelitian, maka penelitian ini akan dilakukan di Pasar Tradisional Jalan Pasar Inpres, Kelurahan Enok, Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir dan Kantor Camat Enok Jl. Gajah mada No.10, Enok, Kabupaten Indragiri Hilir.

Adapun alasan peneliti mengambil penelitian di Pasar Tradisional Kelurahan Enok karena terjadi penumpukan sampah di selokan dan banyak tersebar di sekitar kawasan pasar, hal ini bisa mengakibatkan timbulnya penyakit bagi masyarakat setempat.

C. Informan

Peneliti menggunakan *purposive sampling* karena informan yang diambil tersebut memiliki informasi yang diperlukan mengenai penelitian Tata Kelola Sampah Oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Studi di Pasar Tradisional Kelurahan Enok). Berikut ini adalah informan dalam penelitian ini:

Tabel III.I : Informan dan Key Informan dalam Penelitian penelitian Tata Kelola Sampah Oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Studi di Pasar Tradisional Kelurahan Enok)

No	Jabatan	Informan
1.	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan	Key Informan
2.	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Informan
3.	Camat Enok	Informan
4.	Pedagang	Informan
5.	Masyarakat	Informan

Sumber: Olahan Penulis 2020

D. Jenis dan Sumber Data

Dalam memperoleh data dan informasi yang baik, keterangan-keterangan dan data yang diperlukan penulis, menggunakan metode-metode sebagai berikut :

1. Data Primer

Data Primer adalah data atau keterangan yang diperoleh langsung dari seluruh responden melalui wawancara yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui pengumpulan atau pengolahan data yang bersifat studi dokumentasi berupa penelaahnya terhadap dokumentasi pribadi, resmi kelembagaan, referensi-referensi atau peraturan. Data pendukung yang diperoleh secara langsung berupa dokumen, arsip dan buku-buku, sumber tersebut dapat berupa literature-literatur yang ada hubungannya dengan penelitian ini dan dapat juga berupa keadaan geografis, keadaan penduduk, ekonomi dan sosial budaya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan informasi yang akurat, maka penelitian menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Teknik Observasi

Yaitu peneliti melakukan pengamatan secara langsung dilapangan terhadap objek penelitian untuk melihat kenyataan dan fakta sosial sehingga dapat dicocokkan antara hasil wawancara atau informasi dari informan dengan fakta yang ada dilapangan.

2. Teknik *Inteview* (Wawancara)

Salah satu alat utama yang digunakan dalam pengumpulan informasi, wawancara termasuk mengajukan pertanyaan kepada seseorang atau kelompok dan mencatat jawabannya. Apabila informasi sudah memenuhi tujuan penelitian maka pengajuan pertanyaan akan diakhiri. Wawancara yang dilakukan dalam proses penelitian ini menggunakan teknik wawancara terstruktur yang dilakukan dengan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan.

3. Teknik Dokumentasi

Peneliti mengumpulkan data dengan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian tetapi mempelajari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini seperti buku, jurnal, dan lain-lain sebagainya.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisa data menurut Spradley. Menurut Spradley (dalam Moleong2014:302) analisa data tidak terlepas dari keseluruhan penelitian, maka analisa data dapat dilakukan dilapangan bersama dengan pengumpulan data. Ada empat tahapan analisa data yaitu:

a. Analisa Domein

Analisa domein dilakukan terhadap data yang diperoleh dari pengamatan wawancara atau pengamatan deskriptif yang terdapat dalam catatan lapangan, yang dapat dilihat dari buku lampiran.

b. Analisa Taksonomi

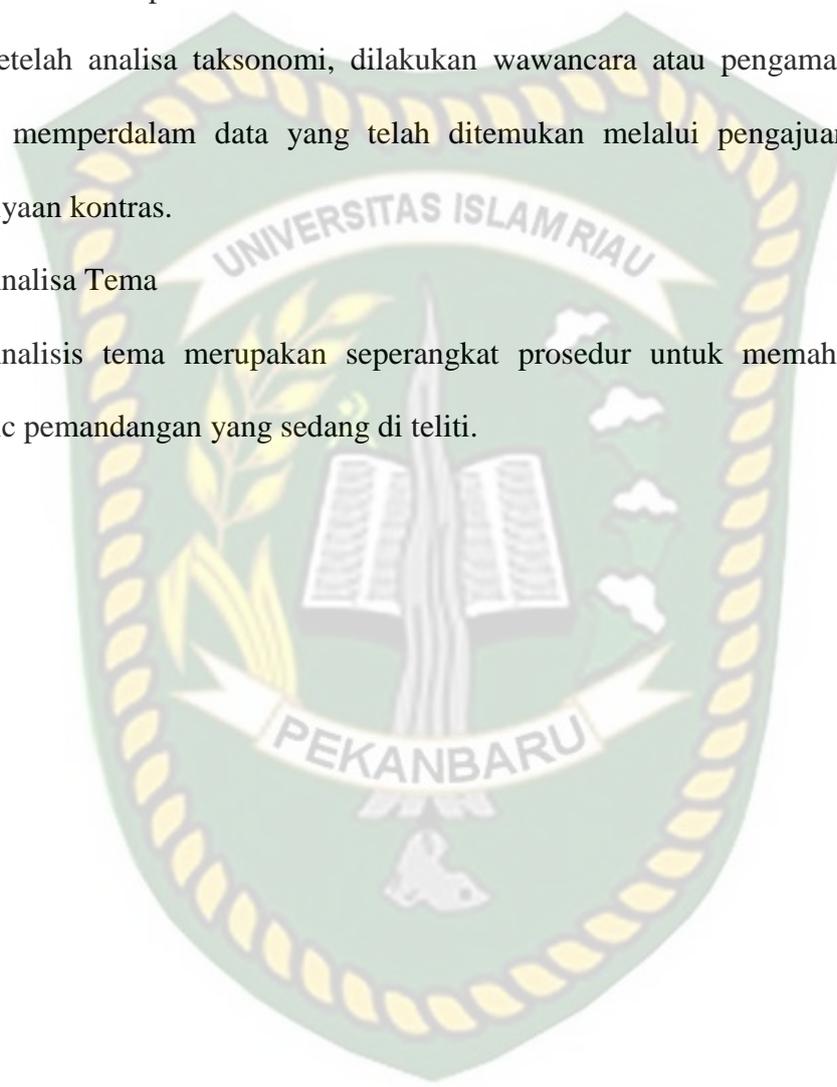
Setelah selesai analisa domein, dilakukan pengamatan dan wawancara terfokus berdasarkan fokus yang sebelumnya dipilih oleh peneliti.

c. Analisa Komponen

Setelah analisa taksonomi, dilakukan wawancara atau pengamatan terpilih untuk memperdalam data yang telah ditemukan melalui pengajuan sejumlah pertanyaan kontras.

d. Analisa Tema

Analisis tema merupakan seperangkat prosedur untuk memahami secara holistic pemandangan yang sedang di teliti.



G. Jadwal Kegiatan Penelitian

Tabel III.2: Jadwal waktu dan kegiatan penelitian penelitian Tata Kelola Sampah Oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Studi di Pasar Tradisional Kelurahan Enok)

No	Jenis Kegiatan	Bulan Dan Minggu																			
		Desember				Januari				Maret				Agustus				Oktober			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan dan Penyusunan UP	X	X	X	X																
2	Seminar UP					X															
3	Revisi UP						X	X	X	X											
4	Penelitian Lapangan										X	X	X								
5	Pengelolaan dan analisa data													X	X						
6	Bimbingan Skripsi															X	X				
7	Ujian Skripsi																	X			
8	Revisi Skripsi																				X
9	Pengesahan dan Penyerahan Skripsi																				X

H. Rencana Sistematika Laporan Hasil Penelitian

Untuk memahami makna dalam penulisan skripsi penulis mengelompokkan dalam 6 (enam) bab yang mana masing-masing bab di gambarkan secara umum sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini di bahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian.

BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIRAN

Dalam bab ini di uraikan tentang studi kepustakaan, penelitian terdahulu, kerangka pikir, konsep operasional, dan operasional variable.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tipe penelitian, lokasi penelitian, informan dan key informan, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan jadwal kegiatan penelitian.

BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

Bab ini menguraikan tempat penelitian, struktur organisasi, tugas dan fungsi dan aktivitas yang di lakukan.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil ini akan di bahas tentang deskripsi data serta pembahasan.

BAB VI : PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan saran-saran sebagai bahan masukan hasil penelitian.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Pada Bab ini akan memberikan penjelasan mengenai keadaan, luas, letak dan beberapa keterangan tambahan yang diperlukan untuk mengenal lebih jauh daerah, tempat yang menjadi objek penelitian. Gambaran umum lokasi penelitian meliputi keadaan geografis, luas wilayah, pemerintahan, serta struktur organisasi, tugas dan fungsi kerja, Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Indragiri Hilir, dan Kantor Camat Kecamatan Enok.

A. Gambaran Umum Kabupaten Indragiri Hilir

1. Keadaan Geografis

Kabupaten Indragiri Hilir di kenal dengan negeri seribu parit. Kabupaten ini sangat dipengaruhi oleh pasang surutnya air sungai/parit, dimana sarana perhubungan yang dominan untuk menjangkau daerah satu dengan daerah lainnya adalah melalui sungai/parit dengan menggunakan speed boat, pompong, dan perahu. Diantaranya sungai-sungai yang utama di daerah ini adalah sungai Indragiri yang berasal dari Danau Singkarang (Sumatera Barat) yang bermuara diselat berhala.

Kabupaten Indragiri Hilir memiliki luas daratan 11.605,97 km² dan memiliki 31 pulau. Penduduk Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2019 sebanyak 740.598 jiwa yang terdiri atas 379.805 jiwa penduduk laki-laki dan 360.793 jiwa penduduk perempuan. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2019, penduduk

laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 105,27. Sedangkan menurut data registrasi dari Dinas Dukcapil, jumlah penduduk Kabupaten Indragiri Hilir sebanyak 629.841 jiwa yang terdiri atas 327.289 penduduk laki-laki dan 302.552 penduduk perempuan. Ibu kota Indragiri Hilir terletak di Kota Tembilahan.

2. Letak Kabupaten Indragiri Hilir

Secara astronomis, Kabupaten Indragiri Hilir terletak antara $0^{\circ} 36'$ Lintang Utara dan $1^{\circ} 07'$ Lintang Selatan, dan antara $104^{\circ} 10'$ - $102^{\circ} 32'$ Bujur Timur.

Berdasarkan letak geografisnya, Kabupaten Indragiri Hilir berada di pesisir timur pulau Sumatera yang menjadi gerbang selatan Provinsi Riau dan berbatasan langsung dengan Provinsi Jambi.

3. Batas

Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Indragiri Hilir memiliki batas-batas:

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Pelalawan
- b. Sebelah Selatan : Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Provinsi Jambi)
- c. Sebelah Barat : kabupaten Indragiri Hulu
- d. Sebelah Timur : Tanjung Balai karimun (Provinsi Kepulauan Riau)

B. Pemerintahan

Pembentukan Pemerintahan Kabupaten Indragiri Hilir dikukuhkan dengan Undang-undang No.6 Tahun 1965 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49 tanggal 14 Juni 1965 dengan ibukotanya Tembilahan. Pada tahun

2005 wilayah administrasi Pemerintahan daerah ini terdiri dari 20 Kecamatan, 18 Kelurahan, 174 Desa.

Pada tahun 2011, jumlah Kelurahan, Desa di Kabupaten Indragiri Hilir mengalami penambahan karena adanya pemekaran Desa yaitu menjadi 203 Desa, 33 Kelurahan. Penambahan jumlah Desa, Kelurahan ini disebabkan karena adanya pemekaran sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 4, 5, 6 Tahun 2011. Perda Nomor 4 mengatur mengenai perubahan status dari Desa menjadi Kelurahan. Jumlah Desa yang berubah status sebanyak 4 Desa. Perda Nomor 5 mengatur tentang pembentukan Kelurahan baru karena adanya pemekaran Kelurahan. Perda Nomor 6 mengatur tentang pembentukan Desa baru karena adanya pemekaran Desa.

Pada tahun 2014 terdapat perubahan status kembali dari Desa menjadi Kelurahan. Jumlah Desa berkurang menjadi 197 Desa, sehingga Kelurahan bertambah menjadi 39 Kelurahan.

Tabel IV.I : Data Nama Kecamatan dan Jumlah Desa/Kelurahan Di Kabupaten Indragiri Hilir

NO	Nama Kecamatan	Luas	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa
1.	Tembilahan	15.164 km ²	8	-
2.	Tembilahan Hulu	13.899 km ²	2	4
3.	Keritang	94.642 km ²	1	16
4.	Reteh	53.183 km ²	3	11

5.	Enok	880,86 km ²	4	10
6.	Tanah Merah	47.660 km ²	1	9
7.	Kuala Indragiri	71.495 km ²	1	7
8.	Tempuling	75.287 km ²	4	5
9.	Batang Tuaka	39.118 km ²	1	12
10.	Gaung Anak Serka	64.995 km ²	3	9
11.	Gaung	207.617 km ²	1	15
12.	Mandah	174.273 km ²	1	16
13.	Kateman	48.781 km ²	3	8
14.	Kemuning	104.984 km ²	1	11
15.	Pulau Burung	58.050 km ²	-	14
16.	Pelangiran	85.396 km ²	1	15
17.	Teluk Belengkong	42.774 km ²	-	13
18.	Concong	26.348 km ²	1	5
19.	Kempas	58.453 km ²	2	10
20.	Sungai Batang	40.489 km ²	1	7

Sumber : Draft RTRW INHIL 2011-2031

Sejak November 2018, Kabupaten Indragiri Hilir dipimpin oleh Drs. H. M. Wardan., MP sebagai Bupati Kabupaten Indragiri Hilir, Wakil Bupati adalah H. Syamsudin Uti, Periode kepemimpinan 2018-2023.

C. Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Indragiri Hilir

1. Tugas dan Fungsi DLHK Kabupaten Indragiri Hilir

Kabupaten Indragiri Hilir merupakan salah satu wilayah di Provinsi Riau yang tidak terlepas dari permasalahan persampahan. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir mengeluarkan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Pemenuhan Ketertiban Umum dan Penyakit Masyarakat. Lakukan melawan sampah. Sampah / Pembersihan untuk tiap area berbeda-beda. Agar dapat diterapkan di suatu daerah, Pemerintah Daerah harus mengeluarkan peraturan daerah persampahan / kebersihan yang dapat menjadi dasar hukum penyelenggaraan jasa persampahan / kebersihan di daerah tersebut.

a. Tugas

Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kabupaten Indragiri hilir memiliki tugas melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup.

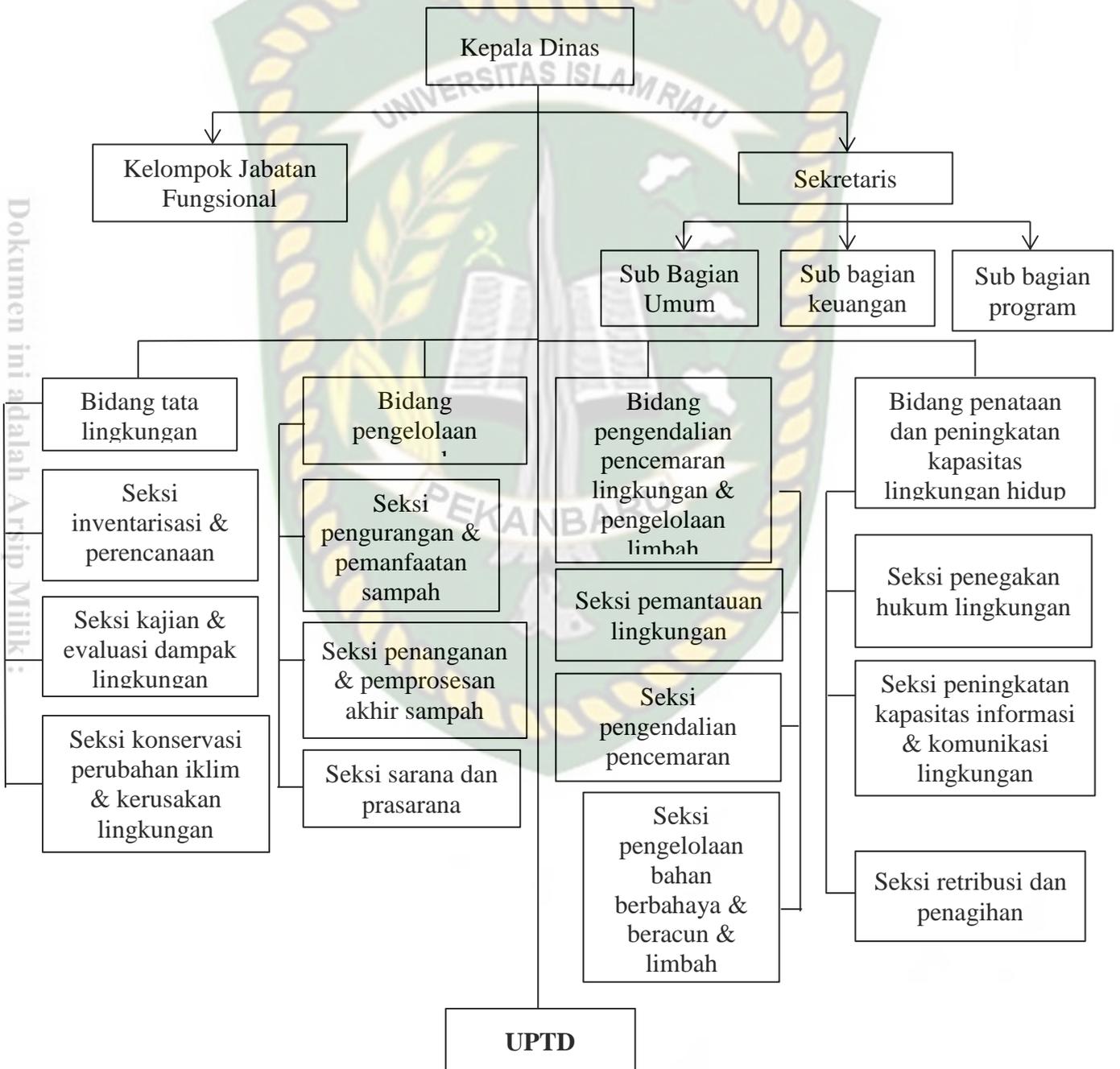
b. Fungsi.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut ini:

- a. Penyusunan kebijakan teknis Urusan Pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup.
- b. Pelaksanaan tugas teknis Urusan Pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup.
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas teknis Urusan Pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup.
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi Urusan Pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir

Gambar IV.I : Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir



D. Gambaran Umum Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Indragiri Hilir.

1. Tugas dan fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Indragiri Hilir.

a. Tugas

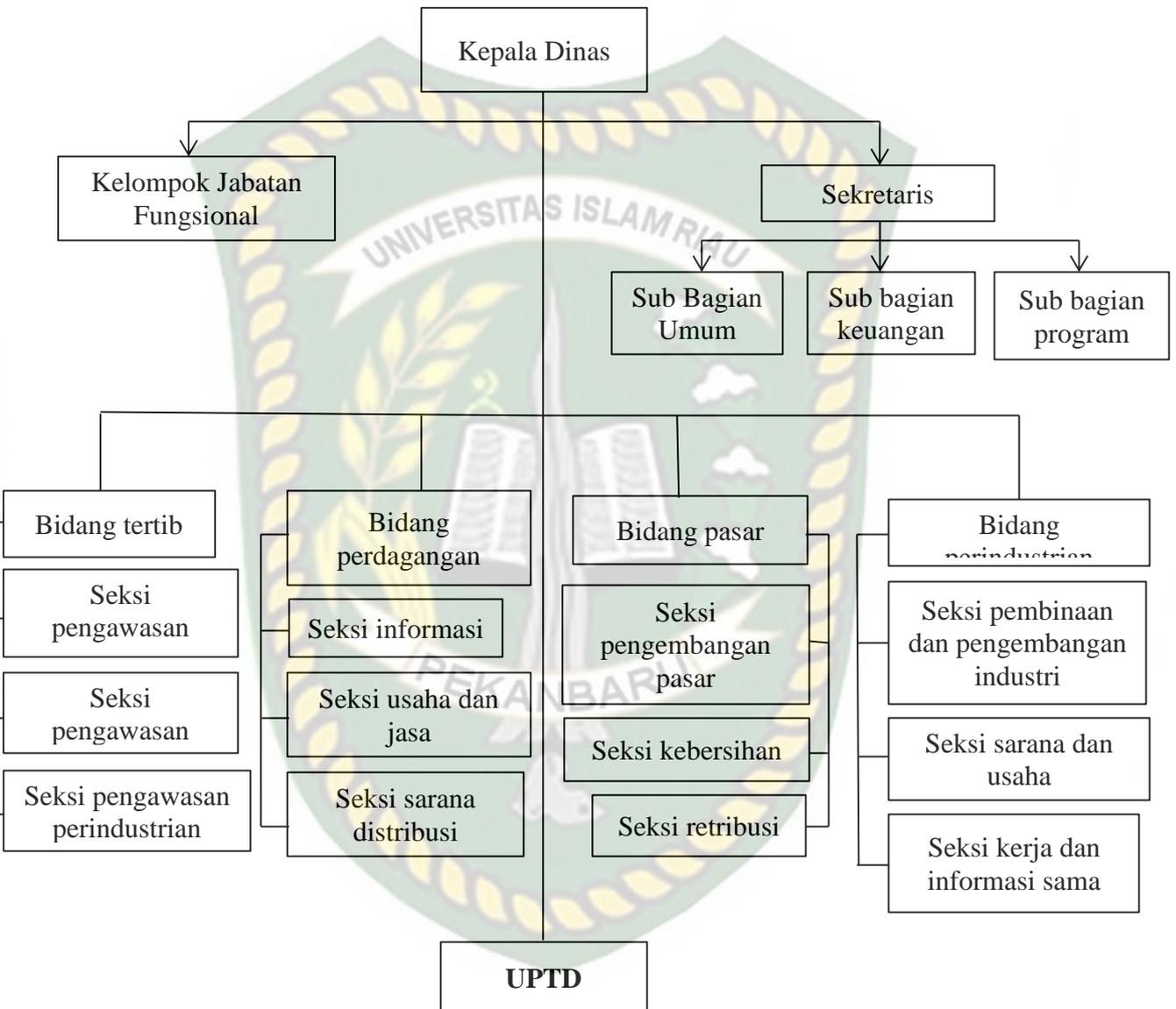
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Indragiri Hilir bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perdagangan, perindustrian dan pengelolaan pasar.

b. Fungsi

- a) Pelaksanaan pelayanan publik di bidang perdagangan, industri dan pengelolaan pasar.
- b) Mendorong pelaksanaan tugas di sektor yang mencakup perdagangan, industri, dan manajemen pasar.
- c) Pelaksanaan urusan Tata usaha Dinas.
- d) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsi dalam rangka kemudahan pelaksanaan tugas.

2. Struktur Organisasi Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Indragiri Hilir

Gambar IV.II : Struktur Organisasi Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Indragiri Hilir



E. Gambaran Umum Camat Enok Kabupaten Indragiri Hilir.

1. Tugas dan fungsi Camat Enok Kabupaten Indragiri Hilir.

a. Tugas

Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

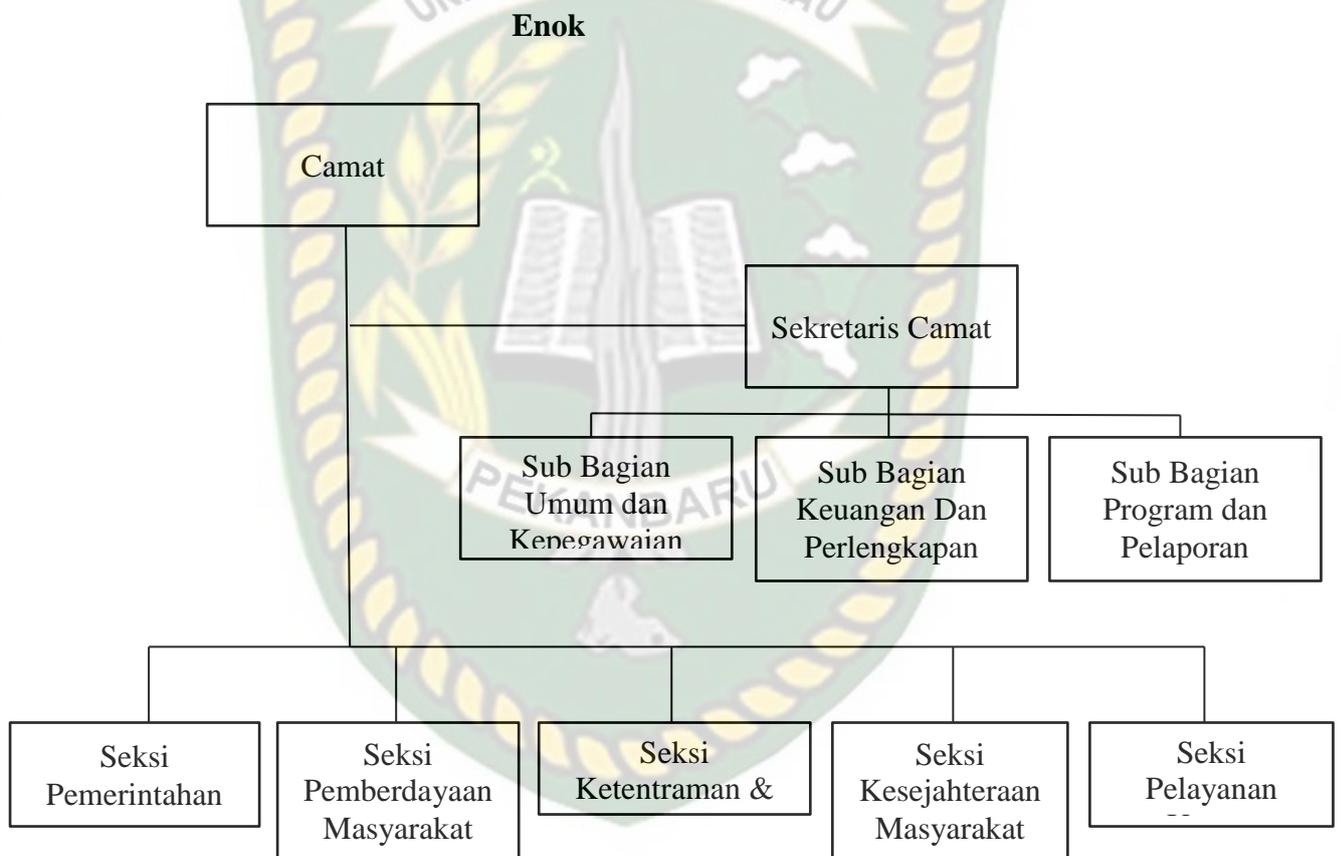
b. Fungsi

- a) Menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- b) Menyelenggarakan upaya untuk menata ketertiban dan ketertiban umum.
- c) Menyelenggarakan pelaksanaan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
- d) Menyelenggarakan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan public.
- e) Menyelenggarakan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan.
- f) Pengembangan tata kelola kelurahan
- g) Pelaksanaan pengabdian masyarakat yang termasuk dalam lingkup tugas dan atau belum dapat dilaksanakan oleh perangkat desa.
- h) Manajemen urusan administrasi.
- i) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

- j) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota sesuai standar yang ditetapkan.

2. Struktur Organisasi Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Indragiri Hilir

Gambar IV.III : Struktur Organisasi Kantor Camat Kecamatan



BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Informan

Sebelum peneliti membahas lebih dalam tentang masalah yang diteliti dalam penelitian ini mengenai Tata kelola sampah oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Studi Pasar Tradisional Kelurahan Enok), terlebih dahulu penulis uraikan identitas informan sebagai berikut :

a. Tingkat Pendidikan Informan

Pendidikan adalah suatu hal yang sangat berpengaruh pada proses peningkatkan sumber daya manusia karena semakin tinggi pendidikan seseorang maka semakin berkualitas orang tersebut. Pendidikan memang peran yang penting dalam upaya meningkatkan kemampuan seseorang, seseorang yang berpendidikan lebih tinggi pada pembelajaran yang akan diberikan kepadanya dibandingkan dengan seseorang yang pendidikannya lebih rendah, untuk lebih jelas dapat dilihat pada table berikut:

Tabel V.I : Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	SMP	3	43 %
2	SMA	1	14 %
3	Strata Satu (S1)	2	29 %
4	Strata Dua (S2)	1	14 %
Jumlah		7	100 %

Sumber : Hasil Penelitian, 2021

Dari table diatas dapat dilihat dengan jelas bahwa tingkat pendidikan informan dalam penelitian ini yaitu SMP sebanyak 3 orang atau 43 %, SMA sebanyak 1 orang atau 14 %, Sarjana sebanyak 2 orang atau 29 %, dan pasca sarjana 1 orang atau 14 %, maka dari gambaran tersebut dapat diketahui bahwa Pendidikan informan paling banyak adalah tingkat SMA yaitu sebanyak 3 orang.

b. Tingkat Umur Informan

Tingkat umur informan sangat mempengaruhi kemampuan setiap individu dalam berfikir dan bertindak, karena semakin tinggi umur seseorang maka akan banyak pula pengalaman yang dimilikinya. Oleh karena itu semakin banyak pengalaman seseorang maka semakin selektif dalam menentukan keputusan untuk bertindak atau bertingkah laku jika dibandingkan dengan yang berumur lebih muda. Umur responden pada penelitian ini dapat dilihat pada table berikut :

Tabel V.II : Identitas Informan Berdasarkan Umur

NO	Tingkat Umur	Jumlah	Persentase
1	21-30	0	-
2	31-40	1	14 %
3	41-50	3	43 %
4	>51	3	43 %
Jumlah		7	100 %

Sumber : Hasil Penelitian, 2021

Dari table diatas dapat dilihat bahwa informan yang berumur 21-30 tahun tidak ada, yang berumur 31-40 tahun sebanyak 1 orang atau 14%, untuk umur 41-50 tahun sebanyak 3 orang atau 43%, dan 51 keatas berjumlah 3 orang atau 43%, jadi berdasarkan gambaran tersebut dapat diketahui bahwa informan dalam penelitian ini sudah dewasa yaitu berumur 41-50 tahun sampai >51 tahun, yang dijadikan informan sebanyak 3 berumur 41-50 tahun dan 3 orang >51 tahun.

F. Hasil Penelitian Tentang Tata Kelola Sampah di pasar tradisional Kelurahan Enok Kabupaten Indragiri Hilir

Tata Kelola dilakukan oleh suatu organisasi, lembaga dan masyarakat untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Dengan tata kelola dalam pemerintahan yang baik maka akan terciptanya pemerintahan yang baik.

Menurut Akhmadi (2004) tata kelola pemerintahan merupakan suatu pelayanan publik yang efisien, sebuah sistem peradilan yang dapat dipercaya, dan sebuah sistem pemerintahan yang bertanggung jawab kepada publik. tata kelola pemerintahan yang baik adalah mampu menciptakan pembangunan yang baik serta membuat dan menciptakan lingkungan yang mendukung berlangsungnya pembangunan yang kuat dan merata.

Menurut Koiman (2009:273), *governance* merupakan serangkaian proses interaksi sosial politik antara pemerintah dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan-kepentingan tersebut. *Governance* merupakan mekanisme-

mekanisme, proses-proses dan institusi-institusi melalui warga Negara mengartikulasi kepentingan-kepentingan mereka, memediasi perbedaan-perbedaan mereka serta menggunakan hak dan kewajiban legal mereka.

Untuk melihat Tata Kelola Sampah di pasar tradisional Kelurahan Enok Kabupaten Indragiri Hilir maka penulis uraikan sebagai berikut:

1. Aktor

Didalam Tata Kelola terdapat Indikator yang menjadi penilaian agar terciptanya Tata Kelola yang baik, yakni Indikator Aktor. Aktor menurut Goran Hyden ialah mencakup aspek kekuasaan, kewenangan, resiproritas dan pertukaran.

Dalam melakukan Tata Kelola Sampah Oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Studi Di Pasar Tradisional Kelurahan Enok) perlu adanya Aktor untuk mengetahui siapa yang memiliki kekuasaan serta kewenangan dalam melakukan Tata Kelola Sampah tersebut.

a. Memastikan kewenangan stakeholder yang terlibat

Kewenangan adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintahkan orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Kewenangan sering dikaitkan dengan kekuasaan. Penggunaan kewenangan secara bijaksana merupakan faktor penting dalam efektivitas organisasi

Dalam pelaksanaan Tata Kelola Sampah di pasar tradisional yang berada di Kelurahan Enok ingin memastikan bahwa pelaksanaan kewenangannya berjalan dengan semestinya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Assek Wella selaku Camat di Kecamatan Enok pada hari Rabu, 10 Maret 2021 di kantor Camat Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir dengan mengatakan bahwa:

”Jadi Untuk Pasar Tradisional karena pasar itu merupakan Aset Pemerintah Daerah, kewenangan Camat tidak ada disana karena Pasar I Kecamatan itu milik dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Indragiri Hilir. Jadi semua kegiatan di Pasar itu dikelola oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Indragiri Hilir retribusinya pun itu dikelola oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Indragiri Hilir.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat diketahui bahwa kewenangan Camat Enok terhadap pengelolaan Pasar Tradisional itu tidak ada, dan semua pengelolaannya dikelola langsung oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Indragiri Hilir.

Selanjutnya menurut hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Fitri selaku Kepala Bidang Pasar pada hari Selasa, 23 Maret 2021 di Kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Indragiri Hilir dengan mengatakan bahwa:

“ Untuk pasar Tradisional itu tanggung jawabnya juga tidak terlepas koordinasinya dari kecamatan karena pasar itu berada didaerah kecamatan, jadi kalau dia (kecamatan) mengatakan bahwa tanggung jawab sepenuhnya Dinas Perdagangan memang benar karena kami yang membangunnya, kami membangunnya untuk kepentingan masyarakat Enok jadi sehingga di sana ada pasar menimbulkan transaksi jual beli dan bisa meningkatkan terhadap pendapatan masyarakat. Dan juga

pihak kecamatan mempunyai tanggung jawab untuk menjaga pasar itu serta bertanggung jawab terhadap penempatan pedagang yang ada disana. Dan ada kami tugas kan petugas dari kami dalam hal untuk melakukan pemungutan retribusi karena fasilitas yang disediakan akan menumbulkan penerimaan Daerah.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat diketahui bahwa memang benar kewenangan pasar itu dimiliki oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Indragiri Hilir namun tidak terlepas juga koordinasinya dengan pihak Kecamatan karena pasar itu berada di Daerah Kecamatan.

Selanjutnya menurut hasil wawancara dengan Bapak Indra selaku Kasi Pemrosesan Akhir Sampah pada hari Kamis, 25 Maret 2021 di kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir dengan mengatakan bahwa:

“ Bahwa penanganan pengelolaan sampah di Kecamatan Enok memang belum terealisasikan pengelolaan sampah karena kurangnya lahan dan masalah biaya. Di Indragiri Hilir sendiri baru 2 Kecamatan yang dapat terealisasikan pengelolaan sampah yakni di Kecamatan Tembilahan dan Kecamatan Tembilahan Hulu.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat diketahui bahwa untuk di Kecamatan Enok belum terealisasikan nya pengelolaan sampah karena jarak tempuh, biaya, ketidak adanya lahan yang membuat pengelolaan sampah di Kecamatan Enok tidak baik.

Menurut pendapat dan hasil wawancara dari sub indikator memastikan kewenangan stakeholder yang terlibat, dari analisis peneliti serta pengamatan yang penulis lakukan dilapangan dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak semua pihak memiliki kewenangan atas pasar dan pengelolaan sampah di pasar

tradisional Kelurahan Enok tersebut. Bisa dilihat dari hasil wawancara dengan pihak kecamatan bahwa kecamatan tidak memiliki kewenangan atas pasar tersebut, kewenangan pasar mutlak dimiliki oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Indragiri Hilir. Pihak Dinas Perdagangan dan Perindustrian mengiyakan atas kewenangan pasar tersebut namun hal itu tidak terlepas dari koordinasi dengan pihak Kecamatan karena letak pasar tersebut terletak pada kawasan Kecamatan.

2. Struktural

Indikator kedua dalam Tata Kelola yaitu Struktural. Struktural atau Structural menurut Goran Hyden ialah mencakup elemen-elemen seperti *compliance* (ketulusan), *trust* (kepercayaan), akuntabilitas dan inovasi.

Dalam melakukan Tata Kelola Sampah Oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Studi Di Pasar Tradisional Kelurahan Enok) perlu adanya Struktural untuk mengetahui siapa yang bertanggung jawab dalam Tata Kelola Sampah tersebut.

a. Memastikan pertanggung jawaban stakeholder dalam pengelolaan sampah pasar

Pertanggung jawaban atau akuntabilitas merupakan konsep etis yang dekat dengan administrasi publik pemerintahan (lembaga pemerintahan eksekutif, lembaga legislatif parlemen dan lembaga yudikatif dari Kekuasaan Kehakiman) yang memiliki beberapa arti, antara lain sering digunakan sebagai sinonim untuk konsep seperti yang dapat dipertanggung jawabkan.

Dalam pelaksanaan Tata Kelola Sampah di pasar tradisional yang berada di Kelurahan Enok, Peneliti ingin memastikan pertanggung jawaban stakeholder dalam pengelolaan sampah pasar dengan baik sehingga tidak ada menimbulkan penumpukan sampah disekitar pasar yang bisa mengakibatkan timbulnya berbagai penyakit.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Assek Wella selaku Camat di Kecamatan Enok pada hari Rabu, 10 Maret 2021 di kantor Camat Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir dengan mengatakan bahwa:

“Kalau untuk di Kecamatan memang untuk saat ini kita belum mempunyai TPS dan TPA karena kemarin memang mau diprogramkan kebetulan pandemi Covid-19 jadi semuanya terhenti sampai sekarang belum ada terlaksanakan, jadi sampah di pasar itu ada yang membersihkan di tumpuk dan langsung di bakar di tempat dan yang sampah berjenis sayuran biasanya hewan-hewan seperti kambing yang memakan nya.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat diketahui bahwa untuk di Kecamatan Enok belum mempunyai TPS dan TPA untuk membuang sampah hasil dari pasar maupun dari masyarakat hal ini yang mengakibatkan penumpukan sampah dibeberapa tempat seperti di selokan sekitar pasar yang membuat selokan tersebut menjadi tersumbat.



Gambar V.I : Penumpukan sampah di mana mana akibat kurangnya pengelolaan sampah di pasar tradisional Kelurahan Enok

Pada gambar diatas adalah pasar tradisional di Kelurahan Enok bisa kita lihat bahwa penumpukan sampah yang sangat banyak, dan tidak terlihatnya tong sampah untuk meletakkan sampah hasil limbah pasar. Sangat disayangkan dan miris melihat banyaknya sampah yang menumpuk semoga secepatnya pada pihak terkait bisa menyelesaikan permasalahan sampah tersebut.

Selanjutnya menurut hasil wawancara dengan Bapak Indra selaku Kasi Pemrosesan Akhir Sampah pada hari Kamis, 25 Maret 2021 di kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir dengan mengatakan bahwa:

”Pada tahun 2020 sudah kami kirim surat ke Kecamatan supaya setiap Kecamatan itu menyediakan lahan untuk pengelolaan persampahan, sampai hari ini belum ada menyediakan lahan, maka dari itu hari ini kami belum dapat melayani 18 Kecamatan itu karena pokok permasalahan nya itu masalah lahan tersebut.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat diketahui bahwa pihak nya sudah mengusul dan sudah memerintahkan kepada Kecamatan untuk menyiapkan lahan, namun sampai saat ini belum ada dari pihak Kecamatan mempersiapkan lahan tersebut.

Selanjutnya menurut hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Fitri selaku Kepala Bidang Pasar pada hari Selasa, 23 Maret 2021 di kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Indragiri Hilir dengan mengatakan bahwa:

“ Sebenarnya sampah itu kewenangannya berada pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir kalaupun sebaiknya harus menunjuk orang yang melakukan pengelolaan sampah,

keterkaitan terhadap petugas pengelolaannya mungkin mengingatkan kepada para pedagang agar mengumpulkan sampah pada tempat tertentu jadi mudah diangkut, sampai hari ini pengelolaan sampah di Kecamatan Enok itu belum di kelola oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat diketahui bahwa untuk Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Indragiri Hilir tidak ada kewenangannya dalam tanggung jawab pengelolaan sampah di pasar tradisional tersebut, namun Kepala Bidang Pasar Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Indragiri Hilir hanya menyampaikan hal yang harusnya dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir yakni harus secepatnya membuat pengelolaan sampah di Kecamatan Enok agar sampah disana dapat di kelola dengan baik.

Menurut pendapat dan hasil wawancara dari sub indikator memastikan pertanggung jawaban stakeholder dalam pengelolaan sampah pasar, dari analisis peneliti serta pengamatan yang penulis lakukan dilapangan dapat ditarik kesimpulan bahwa pertanggung jawaban atas Tata Kelola Sampah di pasar tradisional Kelurahan Enok ialah tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir dan juga di Kecamatan Enok belum mempunyai TPS dan TPA untuk sampah, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir telah memberi surat kepada setiap Kecamatan untuk mempersiapkan lahan, namun ketidak tersediaan nya lahan serta kekurangannya dana dan tranfortasi pengelolaan sampah tersebut maka sampai saat ini 18 dari 21 Kecamatan di Indragiri Hilir belum memiliki

pengelolaan sampah termasuk Kecamatan Enok. Sejauh ini hanya inisiatif dari pihak Kecamatan Melembihkan Retribusi kepada pedagang untuk dana kebersihan yang di upah kepada warga setempat untuk membersihkan pasar, sampah yang berjenis plastik dikumpulkan lalu di bakar dan yang berjenis sayur-sayuran dan buah-buahan biasanya di makan oleh binatang seperti kambing, sapi atau sejenisnya. Maka dari itu semoga pemerintah cepat mengambil tindakan cepat agar permasalahan pengelolaan sampah ini cepat terselesaikan.

3. Empiric

Indikator yang ketiga dalam Tata Kelola yaitu Empiric. Empiric menurut Goran Hyden yaitu mencakup tiga elemen diantaranya pengaruh warga negara resiprositas sosial, kepemimpinan yang responsive dan bertanggung jawab.

Dalam melakukan Tata Kelola Sampah Oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Studi Di Pasar Tradisional Kelurahan Enok) perlu adanya Empiric untuk mengetahui siapa yang berpengaruh atau yang terlibat dalam Tata Kelola Sampah tersebut.

a. Memastikan pengaruh stakeholder dalam pengelolaan sampah

Pengaruh adalah kekuatan yang ada atau berasal dari sesuatu (orang, objek) yang membantu membentuk karakter, keyakinan, atau tindakan seseorang.

Dalam pelaksanaan Tata Kelola Sampah di pasar tradisional yang berada di Kelurahan Enok. Peneliti ingin memastikan pengaruh stakeholder dalam pengelolaan sampah dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Assek Wella selaku Camat di Kecamatan Enok pada hari Rabu, 10 Maret 2021 di kantor Camat Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir dengan mengatakan bahwa:

“ Untuk di Kecamatan Enok belum ada tempat pembuangan sampahnya dan sementara ini masing-masing lah yang membersihkan sampahnya itu termasuklah di pasar itu memang ada yang membersihkan tapi pembuangannya belum ada lagi. Untuk saat ini sampah hasil pasar tersebut langsung bakar di tempat tapi kalau untuk sampah seperti sayur-sayuran dan buah biasanya dimakan oleh hewan seperti burung dan kambing.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat diketahui bahwa pengaruh pihak Kecamatan dalam pengelolaan sampah di pasar tradisional tersebut kurang baik, hal ini dikarenakan di Kecamatan itu sendiri belum ada tempat untuk para pedagang untuk membuang sampah seperti TPS dan TPA, inilah yang bisa membuat penumpukan dan penyebaran sampah dimana-mana.

Selanjutnya menurut hasil wawancara dengan Bapak Indra selaku Kasi Pemrosesan Akhir Sampah pada hari Kamis, 25 Maret 2021 di kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir dengan mengatakan bahwa:

“ Kami sudah menyusun PERBUP No 65 tahun 2019 dilampiran itu pengelolaan sampah dilimpahkan ke Kecamatan, namun saat ini belum terealisasi karena terkendala dianggaran. Maka dari itu kami belum bisa melayani 18 Kecamatan di Kabupaten Indragiri Hilir dalam hal pengelolaan sampah.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat diketahui bahwa pengaruh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir kurang baik disebabkan karena anggaran serta lahan untuk pengelolaan sampahnya yang tidak

ada sehingga pengaruh Dinas belum terlihat dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Enok.

Menurut pendapat dan hasil wawancara dari sub indikator memastikan pengaruh stakeholder dalam pengelolaan sampah, dari analisis peneliti serta pengamatan yang penulis lakukan dilapangan dapat ditarik kesimpulan bahwa pengaruh dari pihak Kecamatan dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir terhadap pengelolaan sampah di Kecamatan Enok sangat tidak baik, dikarenakan sampai saat ini pihak terkait belum bisa menyediakan tempat pembuangan sampah baik TPS maupun TPA. Semoga dalam waktu dekat pihak Kecamatan maupun Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir mampu mengelola sampah di Kecamatan Enok.

G. Hambatan-hambatan Dalam Melakukan Tata Kelola Sampah di Pasar Tradisional Kelurahan Enok Kabupaten Indragiri Hilir

Adapun hambatan-hambatan yang ditemukan dalam melakukan Tata Kelola sampah di pasar tradisional di Kelurahan Enok kabupaten Indragiri Hilir yaitu:

- a. Dilihat dari segi kewenangan stakeholder dari observasi yang dilakukan penelitian kewenangan Tata Kelola sampah di pasar tradisional yang memiliki kewenangan ialah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir namun tidak terlepas juga koordinasinya dengan pihak Kecamatan Enok itu sendiri. Sampah yang menumpuk ini dikarenakan tidak adanya tempat pembuangan sampah itu yang membuat

sampah berserakan. Dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir sendiri menyampaikan bahwa kendala maupun hambatan dalam melakukan Tata Kelola Sampah di pasar tradisional adalah Kecamatan Enok tidak memiliki lahan untuk tempat pembuangan akhir sampah dan juga terkendala oleh biaya yang tentunya tidak sedikit.

- b. Dilihat dari segi pertanggung jawaban stakeholder dari observasi yang dilakukan penelitian pertanggung jawaban dalam melakukan Tata Kelola sampah di pasar tradisional yang memiliki tanggung jawab memang sepenuhnya milik Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir, kendala yang dihadapi yakni Kecamatan Enok tidak memiliki lahan sehingga Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir tidak bisa untuk membuat tempat pembuangan akhir sampah.
- c. Dilihat dari segi pengaruh stakeholder dari observasi yang dilakukan penelitian pengaruh dalam melakukan Tata Kelola sampah di pasar tradisional dari pihak Kecamatan Enok yang dimana pasar tersebut berada tepatnya di Kelurahan Enok ini pihak Kecamatan nya belum terlihat memiliki pengaruh terhadap pengelolaan pasar sampai pengelolaan sampahnya, sampai sekarang pihak Kecamatan belum juga menyiapkan lahan untuk dijadikan tempat pembuangan akhir sampah, hal ini sangat penting menimbang hasil sampah setiap hari makin meningkat sedangkan penanganan akan sampah tidak terelokasikan. Serta kurangnya pengaruh

dan peran masyarakat dalam pembuangan sampah, masih banyak masyarakat yang membuang sampah sembarangan hal ini juga berdampak dengan penumpukan sampah dimana-mana.

H. *Best Practice* Tata Kelola Sampah di salah satu Daerah di Indonesia

Pada bagian ini penulis akan memberikan gambaran atau contoh mengenai *best practice waste management* atau praktek terbaik Pengelolaan sampah yang ada di salah satu kota di Indonesia. Tentang bagaimana seriusnya mereka dalam mengelola sampah agar tidak terjadi penumpukan sampah. Contoh terdekatnya kita lihat di Daerah tetangga yakni Banda Aceh.

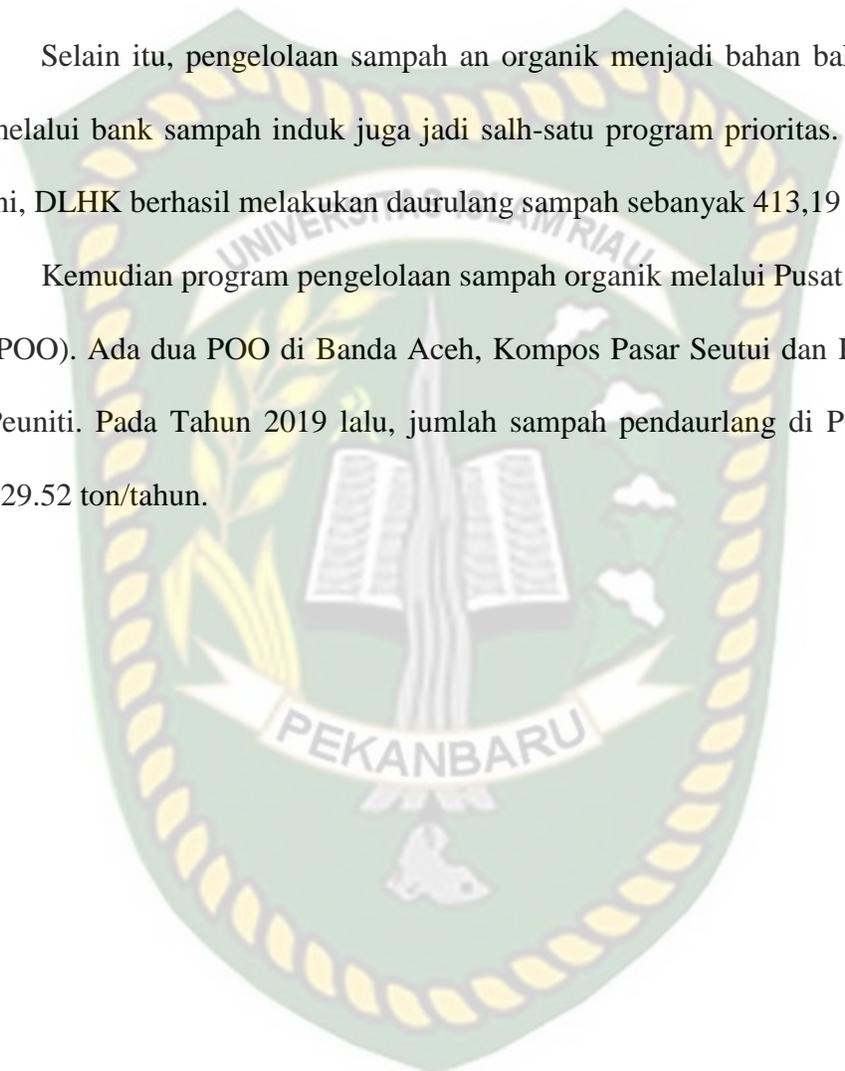
Kota Banda Aceh merupakan kota terbaik di Indonesia dalam bidang pengelolaan sampah. Penilaian ini berdasarkan penelitian yang dilakukan Lokadata. Perusahaan media dengan fokus utama pada jurnalisme data dan riset ini, pada bulan Juli lalu mengeluarkan rilis kota-kota dengan pengelolaan sampah terbaik di Indonesia. Dan Banda Aceh menempati posisi pertama, dimana memiliki persentase tertinggi dari seluruh kota di Indonesia dalam mengolah sampah, yakni 95 %.

Pemko melalui Dinas Lingkungan Hidup, Keindaham dan Kebersihan Kota (DLHK3) terus melakukan inovasi-inovasi dengan merancang berbagai program pengelolaan dan pengolahan sampah di Banda Aceh. program lain juga telah dilakukan mulai dari pengelolaan sampah organik di TPS 3R, dimana ada dua TPS di Banda Aceh dengan pengelolaan sampah mencapai 46 ton/hari.

Kemudian juga dilakukan pengelolaan sampah melalui bank sampah unit. Ada 47 unit bank sampah tersebar di seluruh wilayah kota. Sampah berhasil didaurulang dari bank sampah unit ini mencapai 165,22 ton/tahun.

Selain itu, pengelolaan sampah organik menjadi bahan baku daur ulang melalui bank sampah induk juga jadi salah-satu program prioritas. Dari program ini, DLHK berhasil melakukan daurulang sampah sebanyak 413,19 ton/tahun.

Kemudian program pengelolaan sampah organik melalui Pusat Olah Organik (POO). Ada dua POO di Banda Aceh, Kompos Pasar Seutui dan Kompos Pasar Peuniti. Pada Tahun 2019 lalu, jumlah sampah pendaurulang di POO mencapai 129.52 ton/tahun.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan penulis pada bab V hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa sesuai dengan teori pengembangan dalam penelitian ini, yakni Teori Tata Kelola Aktor, Struktural, dan Empirik. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak semua pihak memiliki kewenangan atas pasar dan pengelolaan sampah di pasar tradisional Kelurahan Enok tersebut. Bisa dilihat dari hasil wawancara dengan pihak kecamatan bahwa kecamatan tidak memiliki kewenangan atas pasar tersebut, kewenangan pasar mutlak dimiliki oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Indragiri Hilir. Pihak Dinas Perdagangan dan Perindustrian mengiyakan atas kewenangan pasar tersebut namun hal itu tidak terlepas dari koordinasi dengan pihak Kecamatan karena letak pasar tersebut terletak pada kawasan Kecamatan.

Di Kecamatan Enok belum mempunyai TPS dan TPA untuk sampah hal ini yang mengakibatkan penumpukan sampah di beberapa tempat seperti di selokan sekitar pasar yang membuat selokan tersebut menjadi tersumbat, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir telah memberi surat kepada setiap Kecamatan untuk mempersiapkan lahan, namun ketidaktersediaannya lahan serta kekurangannya dana dan transportasi pengelolaan sampah tersebut maka sampai saat ini 18 dari 21 Kecamatan di Indragiri Hilir belum memiliki pengelolaan sampah termasuk Kecamatan Enok.

Melalui penelitian ini juga diketahui hambatan hambatan dalam melakukan Tata Kelola sampah di pasar tradisional , adapun hambatan tersebut antara lain :

1. Belum tersedianya tempat pembuangan akhir sampah yang mengakibatkan belum terelokasinya sampah pasar dan sampah masyarakat sehingga terjadilah penumpukan sampah
2. Terkendala oleh biaya yang membuat pengoperasian pengelolaan sampah di Kelurahan Enok tidak bisa terlaksana
3. Kurangnya kesadaran masyarakat serta dari pihak Kecamatan terhadap sampah di Kelurahan Enok.

B. Saran

Adapun saran penulis berikan sebagai masukan dalam Tata Kelola Sampah oleh Pemerintah Daerah (Studi di pasar tradisional Kelurahan Enok) adalah sebagai berikut:

1. Disarankan kepada pihak Kecamatan Enok dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir agar turun dan melihat keadaan di pasar agar tau gimana keadaan sampah yang bertebaran dimana-mana
2. Disarankan kepada pihak Kecamatan Enok dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir agar cepat mengambil tindakan bagaimana pengelolaan sampah di Kecamatan Enok tersebut dan segeralah menyediakan tempat pembuangan sementara (TPS) dan tempat pembuangan akhir (TPA) sampah di Kecamatan Enok.

3. Disarankan kepada masyarakat serta pedagang untuk membantu Pemerintah dalam penanganan sampah seperti tidak membuang sampah sembarangan.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Akhmadi, Nuning. 2004. *Tata Kelola Pemerintah dan Penanggulangan Kemiskinan: Bukti Awal Desentralisasi di Indonesia*. Yogyakarta;
- Ali, Zainuddin, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika Jakarta.
- Arifin, Anwar. 2006. *Ilmu Komunikasi : sebuah pengantar ringkas*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada
- Chhotra & Stoker Dalam Prakoso Bhawiwara Putra. 2014 *Tata Kelola Sistem Inovasi Nasional di Indonesia*, Jakarta ; LIPI Press.
- Creswell, Jhon W. 2016. *Research Design, Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hadi, Sutrisno. 2001. *Metodologi Research Jilid III*. Yogyakarta: Andi Offset
- Handayani, S. 2000. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi Dan Manajemen*, Jakarta: Gunung Agung
- Hyden, Goran, 1992, *Governance and The Study of Politics*, dalam Goran Hyden (eds), *Governance and Politics in Africa*, , Lynne Rienner, Colorado
- Inu Kencana Syafii, *Ilmu Pemerintahan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013
- Koiman. 2009. *Prinsip Transparansi, Prinsip Peduli pada Stakeholder*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar
- Kuncoro Sejati. 2009. *Pengolahan Sampah Terpadu*. Yogyakarta: Kanisius
- Labolo, Muhadam. 2007. *Memahami Ilmu Pemerintahan*, Jakarta : Kelapa Gading Permai.
- Mahmudi. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta; UII Press

Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta

Penerbit Andi

Munaf Yusri. 2016. *Hukum Administrasi Negara*: Pekanbaru. Maarpoyan Tujuh.

Ndraha, Taliziduhu . 2001 . *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta : PT.

Rineka Cipta.

Poerwadarminta. (2006). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka

Santosa,P. 2008. *Administrasi Publik Teori dan Aplikasi Good Governance*.

Bandung; Refika Aditama

Sujarweni, V. Wiratna. 2015. *Akuntansi Manajemen*. Yogyakarta: Pustaka Baru

Press.

Sumiarni, Endang, 2013, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Statistik*, Yogyakarta.

Syamsuddin, H. 2007. *Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Jakarta: mLIPPI pres

Zainal Abiding Bagir, *Integrasi Ilmu Dan Agama*, (Bandung: Mizan Pustaka,

2010) 2010

Jurnal

Aertembaga, K., & Bitung, K. (2018). *Issn : 2337 - 5736. 1.*

Astomo, P. (2014). Penerapan Prinsip-Prinsip Pemerintahan yang Baik dalam

Penyelenggaraan Pemerintahan. *Kanun - Jurnal Ilmu Hukum*, 16(3), 401–

420. <https://doi.org/10.24815/kanun.v16i3.6038>

Ayu, A. P., & Alibasyah, H. (2020). *REPRESENTASI PASAR TUMPAH. 5(2)*,

22–35.

Azhari, R. (2017). *Koordinasi Kepala Desa Dengan Badan. 5(2)*, 543–556.

Fatma, F., & Fatmawati. (2020). Analisis Pengelolaan Sampah Kota di

- Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir. *Jurnal Public Health*, 1(2), 64–75.
- Harahap, J. M., Hasibuan, M. I., & Watrianthos, R. (2020). *Pengaruh Reward and Punishment (Penghargaan dan Hukuman), Koordinasi Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja SDM Program Keluarga Harapan (PKH) di*. 02(01), 1–8.
- Bai, R., & Sutanto, M. (2002). *The practice and challenges of solid waste*
- Mahfud, M. (2015). Peran Dan Koordinasi Stakeholder Dalam Pengembangan Kawasan Minapolitan Di Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar. *Jurnal Administrasi Publik Mahasiswa Universitas Brawijaya*, 3(12), 2070–2076.
- Manoppo, I. R. A. (2017). Issn : 2337 - 5736. *Ilmu Pemerintahan*, 2(2).
- Munaf, Y., Febrian, R. A., & S, R. S. (2018). *KOTA PEKANBARU (Studi Kasus Pada Pelayanan Pertanahan). IV(2)*.
- Rampengan, B. R., Lengkong, F. D., & Dengo, S. (2018). Efektifitas Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kecamatan Malalayang Kota Manado. *Jurnal Administrasi Publik*, 4(53).
- Rauf, R. (2017). Perubahan Kedudukan Kelurahan Dari Perangkat Daerah Menjadi Perangkat Kecamatan. *WEDANA Jurnal Pemerintahan, Politik Dan Birokrasi*, III(April), 221–232.
- Rechtsordnung, V. O. N. S. D. E. (2019). *Dosen Fakultas Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta*.
- Rusadi, S., Wedayanti, M. D., & Branding, C. (2019). *Strategi City Branding Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Siak*. V(2), 16–21.

Shalfiah, R. (2013). Peran Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam Mendukung program-program Pemerintah Kota Bontang. *EJournal Ilmu Pemerintahan*, 1(3), 975–984.

<http://perpustakaan.unmul.ac.id/ejournal/index.php/um/article/view/92>

W, D. (2013). Peran Dan Koordinasi Antar Instansi Dalam Pemberdayaan Warga Binaan Pemasarakatan Di Lembaga Pemasarakatan. *Jurnal Administrasi Publik Mahasiswa Universitas Brawijaya*, 1(2), 174–180.

Dokumen

Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Bupati INHIL Nomor 20 Tahun 2011

Badan Pusat Statistik Kecamatan Enok Tahun 2018

IDN Times Tahun 2020